

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN DI RA PERMATA HATI CILACAP**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Peryaratan Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M. Pd.)

Oleh:

MAHRURI
NIM. 201765031

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Mahruri
NIM : 201765031
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan
Di RA Permata Hati Cilacap

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19720420200312 1001

Tanggal:

Dosen Pembimbing

Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19720420200312 1001

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 574 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Mahruri
NIM : 201765031
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati Cilacap

Telah disidangkan pada tanggal **08 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 10 Juni 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul:

“Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan Di RA Permata Hati Cilacap”

Seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Namun ada bagian bagian tertentu dalam penulisan tesis saya kutip dari hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya, dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat pada bagian bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Mei 2022

Hormat Saya



Mahruri
NIM. 201765031

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : Mahruri
NIM : 201765031
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan
Di RA Permata Hati Cilacap

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Purwokerto, Juni 2022
Pembimbing



Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.

NIP. 19720420200312 1001

Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati

Cilacap

Mahruri

Nim. 201765031

Abstrak

Kemampuan lembaga pendidikan untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat merupakan hal urgen, karena dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi akan berdampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat yang muaranya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Bryte dan Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Tony Gelsthorpe dan John West-Burnham bahwa sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi memiliki satu dari dua kesempatan membuat perbaikan yang signifikan, sedangkan sekolah yang rendah tingkat kepercayaannya dari masyarakat hanya memiliki satu dalam tujuh kesempatan untuk memperbaiki.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yakni kepala RA Permata Hati dan masyarakat. Objek penelitian adalah peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA permata hati cilacap

Hasil penelitian ialah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana anggaran belanja yang berasaskan musyawarah untuk mufakat melalui tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat, baik pada jenis pembiayaan capital cost maupun recurrent cost di mana wujud partisipasinya dilakukan melalui kehadiran dalam pertemuan wali santri, rapat panitia pembangunan gedung RA Permata Hati, dan pertemuan-pertemuan lain yang berada di wilayah RA Permata Hati, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana dengan menggunakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat; kegiatan administrasi dan koordinasi berupa pencatatan dana yang masuk dan keluar; serta penjabaran program pembiayaan pendidikan melalui pertemuan rutin pengurus, guru, dan wali siswa.

Kata kunci : peran serta masyarakat, pembiayaan pendidikan

Public Participation In Education Financing Planning At RA Permata Hati

Cilacap

Mahruri

Nim. 201765031

Abstract

He ability of educational institutions to gain high trust from the community is urgent, because high public trust will have a positive impact on increasing community participation which leads to the development and improvement of the quality of educational institutions. This is in line with research conducted by Bryte and Schneider as quoted by Tony Gelsthorpe and John West-Burnham that schools or educational institutions with high levels of public trust have a one in two chance of making significant improvements, while schools with low levels of public trust have a one in two chance of making significant improvements. His trust from the public only has a one in seven chance to improve.

This research is a qualitative research, with descriptive analysis methods and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were the head of RA Permata Hati and the community. The object of research is the participation of the community in financing education at RA Permata Hati, Cilacap

The result of the research is that public participation in education financing planning at RA Permata Hati is carried out by involving the community in making decisions regarding the preparation of a budget plan based on deliberation for consensus through the stages of problem analysis, potential analysis, and analysis of community interests, both on the type of capital cost financing and recurrent cost in which the form of participation is carried out through attendance at student guardian meetings, RA Permata Hati building construction committee meetings, and other meetings in the area of RA Permata Hati, community participation in the implementation of education financing at RA Permata Hati carried out through resource mobilization and funds using the principles of the community, by the community, and for the community; administrative and coordination activities in the form of recording incoming and outgoing funds; and the elaboration of education financing programs through regular meetings of administrators, teachers, and student guardians.

Keywords: community participation, education financing.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jin	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

3. *Ta'Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-aulya</i>
-------------------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌َ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	ā
----	----------------------	---------	---

MOTTO

- Allah akan meninggikan derajat bagi hambaNya yang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu.
- Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Ilahi Rabbi, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Duryati dan Ibu Tursinah yang senantiasa mengajari arti kesabaran, kerja keras, semangat belajar, dan memotivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak dan Ibu dan memberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT.
2. Istriku tercinta Nurjanah, putraku tercinta Adnan Asy'aruddin, Yusuf Hilman Zakaria dan Sahal Muzadi Siroj yang selalu mendukung, menemani dan memberikan semangat serta motivasi. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
3. Bapak Dr. Rohmat, M.Ag, M.Pd selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Saudara, sahabat dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Teman-teman seperjuangan MPI B Angkatan 2020, terimakasih atas dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
6. Kampus Hijau UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, segala puji syukur ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati Cilacap” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Moh Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Rohmat, M.Ag, M.Pd., selaku Penasehat Akademik Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Jauharatun Nurul Jannah, S.Pd.AUD, selaku Kepala RA Permata Hati Cilacap, beserta segenap Dewan Guru, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
6. Segenap dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau dibalas dengan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon kritikan dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.

Purwokerto, Mei 2022

Mahruri
NIM. 261765031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TIM PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.....	14
A. Peran masyarakat	14
1. Pengertian Peran	14
2. Pengertian Masyarakat.....	15
3. Pengertian Peran Masyarakat.....	16
4. Bentuk dan Tingkat Peran.....	18
5. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	22

	6. Indikator Peran Masyarakat	27
	7. Upaya Peningkatan Peran Masyarakat.....	28
	8. Faktor Pendukung Kegiatan Peran serta Masyarakat	30
	9. Faktor Penghambat Kegiatan Peran serta Masyarakat....	31
	B. Pembiayaan pendidikan	34
	1. Pengertian pembiayaan pendidikan	34
	2. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan.....	39
	3. Sumber pembiayaan pendidikan	40
	4. Prinsip pembiayaan pendidikan	43
	5. Sistem pembiayaan pendidikan.....	43
	6. Mekanisme pembiayaan pendidikan.....	44
	7. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan.....	45
	8. Evaluasi pembiayaan pendidikan.....	46
	C. Peran Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan	47
	D. Penelitian yang Relevan.....	51
	E. Kerangka Berfikir.....	60
BAB III	METODE PENELITIAN.....	63
	A. Jenis Penelitian.....	63
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
	D. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	69
	A. Gambaran Umum RA Permata Hati	69
	B. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati	77
	1. Bidang Membangun Jaringan	85
	2. Bidang Usaha	87
	3. Bidang Koperasi.....	88
	4. Bidang Finansial	91
	C. Pembahasan.....	94

BAB V	PENUTUP.....	104
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu	57
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan..... 61



DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumentasi
- Pedoman Observasi
- Hasil Observasi
- Pedoman Wawancara
- Hasil Wawancara
- Biodata Diri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia menghendaki adanya kemajuan dalam kehidupan, sejak itulah timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan bangsa. Pendidikan nasional disusun sebagai usaha untuk memungkinkan bangsa Indonesia, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan diri secara terus menerus demi satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga mampu menjawab segala kebutuhan permasalahan dan tantangan hidup.¹

Pendidikan ialah proses pembelajaran yang memiliki pandangan untuk mewujudkan orientasi pembelajaran yang sistematis guna mengembangkan keterampilan individu, pematangan akhlak siswa, serta mempersiapkan individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Kristin, pendidikan dipandang sebagai hak yang ditujukan pada masyarakat dan sesuatu yang bernilai di kehidupan seseorang. Pendidikan sebagai proses yang kompleks dengan tujuan untuk mengembangkan, mengondisikan, serta menciptakan manusia sebagai makhluk yang paripurna (sempurna).²

Dalam lingkup pendidikan, guru berperan sangat strategis dalam mencapai orientasi pendidikan. Berhasil atau gagal nya sebuah pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung pada guru. Guru mempunyai tugas yang sangat berat yaitu diharuskan menemukan inovasi strategi pembelajaranyang bisa menjadikan anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.

¹ Husnul Qausarina, *Pengaruh Kecemasan Matematika (Math Anxiaety) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016.

² Rofik Akbar, "Analisis Pembelajaran Aktif dengan Pendidikan Collaborative Learning pada Mata Kuliah Manajemen Pendidikan di STAIN Kudus", *Jurnal*. Diakses pada 15 Oktober 2021. (<http://journal.stain.kudus.ac.id>)

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur melalui kemampuan siswa dalam merefleksikan dan memahami materi secara baik.³

Pendidikan memiliki peran penting untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor permasalahan yang ada dalam kehidupan. Melalui paradigma tersebut, pendidikan diharapkan memberikan solusi untuk melawan tantangan dan masalah yang akan terjadi pada kehidupan.⁴

Implementasi dari Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mencakup konsekuensi otonomi yang lebih luas dan desentralisasi bidang-bidang kewenangan daerah, termasuk pendidikan.⁵ Khusus dalam bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 044/U/2002 Tentang Komite Sekolah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan secara eksplisit kewenangan daerah mengelola bidang pendidikan.⁶

Di samping itu implementasinya dapat dipandang sebagai perbaikan kualitas pendidikan nasional yang dirasakan belum memadai. Menurut Suryosubroto; ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*: strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input and output oriented*. Strategi ini lebih bersandar pada asumsi bilamana semua *input* pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah)

³ Norhayati Endah Permatasari, "Peningkatan Hasil IPA Kelas 5 SD Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Berbantu Media Gambar", *JPSD*, Vol. 3 Nomor 2, September 2017 ISSN 2540-9093.

⁴ Azizah Alif Luthvi, Latif, dan Anen, "Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Literasi, *IQ (Ilmu Al-Qur'an) Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 1, Nomor 2, 199-219.

⁵ *Undang-undang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Aneka Ilmu 1999), hlm. 10.

⁶ UU. SISDUKNAS, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Solo: CV. Kharisma Solo, 2003), hlm.

akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* yang diperkenalkan dalam teori *education production function* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua: pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah diatur pada Bab III Pasal 8 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dalam perspektif dan praktik otonomi daerah, pendidikan merupakan salah satu bidang yang pengelolaannya secara utuh didesentralisasikan ke daerah (kabupaten/kota). Momentum ini secara simultan dan imanen daerah harus memberdayakan diri serta beradaptasi dengan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang menekankan pada partisipasi aktif dan terbuka masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun kontrol proses serta hasil pendidikan.

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan ditempatkan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki ciri khas, unit perencanaan, pembuatan keputusan dan manajemen sendiri. Paradigma ini selain merupakan jawaban atas tuntutan otonomi dan reformasi pendidikan hingga di tingkat

satuan (sekolah) yang diharapkan mampu mendorong keberdayaan sekolah menyesuaikan diri dengan tingkat-tingkat perubahan, tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosiologisnya. Juga berarti keharusan sekolah memperhatikan dan mendayagunakan aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki peran dan fungsi yang strategis. Menurut Pidarta perspektif keberdayaan sekolah yang diharapkan secara analogis digambarkan: Sekolah tidak dibenarkan sebagai menara air, yaitu melebur menjadi satu dengan masyarakat tanpa memberikan identitas apa-apa. Ia juga tidak dibenarkan sebagai menara gading yang mengisolasi diri terhadap masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan yang benar ibarat menara penerang, yaitu berada di masyarakat dan sekaligus memberi penerangan kepada masyarakat setempat. Lembaga pendidikan harus tetap berakar pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat setempat, melaksanakan aspirasi mereka, memanfaatkan fasilitas setempat untuk belajar, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat. Sementara itu ia berusaha meningkatkan cara hidup dan kehidupan masyarakat dengan cara memberi penerangan, menciptakan bibit unggul, menciptakan teknologi baru.⁷

Dalam riset lain yang dilakukan oleh Aliyu A. Kanau dan M. J. Haruna dengan judul *Towards Promoting Community Participation in Education in Nigeria* diperoleh informasi:

Poor community participation as a major draw back to the development of education in Nigeria and in view of the fact that government alone cannot shoulder total responsibility of providing education for all and at all levels, the need for strategizing ways of enhancing and encouraging community participation.⁸

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat menjadi penghambat bagi pengembangan pendidikan dan pemerintah sendiri tidak dapat bertanggungjawab secara penuh

⁷ Made Pidarta, *Landasan Pendidikan, Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta : Renika Cipta, 2007), hlm. 178.

⁸ Aliyu A. Kanau dan M. J. Haruna, "Towards Promoting Community Participation in Education in Nigeria", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 2, no. 7 (2013): 131-136.

untuk menyediakan pendidikan bagi semua warganya dan di semua tingkat sehingga dibutuhkan upaya untuk menyusun strategi guna meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyu dan Haruna mengindikasikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pendidikan merupakan hal urgen, bahkan lemahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat jalannya pengembangan dan peningkatan pelayanan pendidikan sehingga hal tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk menyusun strategi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Deskripsi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor *input* pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. *Input* pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (*school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement*). Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak.

didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (*adanya benchmarking*).

Dasim Budimansyah menegaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mendongkrak mutu pelayanan pendidikan adalah dengan penguatan partisipasi masyarakat, yakni dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan

menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan.⁹ Partisipasi masyarakat dinilai penting karena merupakan salah satu realisasi dari esensi demokrasi berkeadilan. Hal tersebut bermakna bahwa selain masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, juga melekat kewajiban pada mereka untuk ikut serta dalam pengadaan dan pengelolaan pendidikan, baik dalam hal penyediaan dana, pengembangan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasinya.

Dalam perspektif ini sekolah berfungsi sebagai jantung masyarakat yang harus didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bangsa. Optimalisasi sumberdaya yang berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut. Pemberdayaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Pemberdayaan sekolah tersebut memiliki kepentingan yang jauh menjangkau ke depan. Hal ini didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Semakin tinggi tingkat dan perkehidupan sosial maka semakin tinggi pula tuntutan yang diinginkan, yang ada pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara pada pendidikan. Masyarakat meyakini bahwa pendidikan/sekolah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi.¹⁰

Kemampuan lembaga pendidikan untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat merupakan hal urgen, karena dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi akan berdampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat yang muaranya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Bryte dan Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Tony Gelsthorpe dan John

⁹ Dasim Budimansyah, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Educationist* 2, no. 1 Januari (2008): 57

¹⁰ Supriono S. dan Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Malang: Anggota IKAPTI, cabang Malang, 2001), hlm. 84.

West-Burnham bahwa sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi memiliki satu dari dua kesempatan membuat perbaikan yang signifikan, sedangkan sekolah yang rendah tingkat kepercayaannya dari masyarakat hanya memiliki satu dalam tujuh kesempatan untuk memperbaiki.¹¹

Hal tersebut semakin memperkuat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal urgen yang diperlukan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Pada penelitian lain disebutkan pula bahwa hanya madrasah atau lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan dalam kepercayaan yang dapat membuat perbaikan dalam kinerja akademik.¹² Hasil penelitian tersebut menunjukkan pula bahwa integritas hubungan sosial merupakan hal penting yang perlu didahulukan demi perbaikan kinerja oleh madrasah atau lembaga pendidikan.

Conyears dalam Yahya Mof, dkk. mengidentifikasi tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu di antaranya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Karenanya, lembaga pendidikan harus terus berupaya memelihara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran-tawaran program yang mampu menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan tentu saja program yang dibangun harus mampu menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan, sehingga kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan harus dikembangkan secara sinergis.¹³ Hal ini mengingat

¹¹ Tony Gelsthorpe dan John West-Burnham, *Educational Leadership and the Community; Strategies for School Improvement Through Community Engagement* (London: Pearson, 2003), hlm. 10

¹² K. A. Rahman, "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Jambi* 1, no. 2, Desember (2012): 243

¹³ Yahya Mof, dkk., "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin", *Jurnal Tashwir Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari* 1, no.2, Juli – Desember (2013): 62

adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa.

Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal itu diakui secara resmi, baik dalam undang-undang maupun beberapa peraturan Menteri. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pada lingkup yang lebih luas lagi, masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan, pada tingkat makro, pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan bagi warga negaranya. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang menjadi dasar pembentukan komite sekolah dan dewan pendidikan, tujuan dibentuknya komite adalah mewedahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan. Untuk itu, maka upaya menggalang peran serta masyarakat bagi terlaksananya pendidikan perlu diusahakan, disamping terlaksananya aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan manajemen pembiayaan. Masyarakat merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah, semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat sekitar, masyarakat akan tinggal di sekitar sekolah sepanjang 24 jam. Masyarakat merupakan salah satu sumber pemasukan uang pemerintah, oleh karena itu masyarakat merupakan aset penting dalam pembangunan termasuk dalam pembiayaan pendidika.¹⁴

¹⁴ Nur Khoiri, Model Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Jepara, *Semnas BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2017*, ISBN: 978-602-8916-33-2.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sulistyorini bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas memerlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan dan salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas adalah masalah keuangan atau pembiayaan pendidikan.¹⁵ Dalam konteks tersebut, Sulistyorini menegaskan bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, pelaksanaan program supervisi, dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan lainnya.¹⁶ Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hal vital bagi sebuah lembaga pendidikan termaksud di RA Permata Hati Cilacap dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena kegiatan pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan sebuah penanganan dalam segi finansial yang memadai di mana hal tersebut erat kaitannya dengan sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang kuat pula.

Sumber pembiayaan pendidikan merupakan semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Definisi sumber pembiayaan pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan dan kualitas pendidikan yang didukung dengan adanya pembiayaan pendidikan yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau lembaga pendidikan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan, yakni keluarga (wali siswa) dan masyarakat.¹⁷ Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga (wali siswa), dan masyarakat. Hal tersebut menegaskan pula bahwa orang tua atau wali siswa dan masyarakat mempunyai kewajiban

¹⁵ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: eKAF, 2006), hlm. 98.

¹⁶ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam...*, hlm. 98.

¹⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 113.

untuk berpartisipasi dan memikul bersama kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan.

Siti Irene Astuti Dwiningrum menguatkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah.¹⁸ Dari apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa keterlibatan orang tua atau wali siswa dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali setidaknya menunjukkan semakin besar pula partisipasinya dalam mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala RA Permata Hati Cilacap peneliti menemukan informasi bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan manajemen pembiayaan. Dari wawancara ini dilakukan kepada Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD, menyampaikan bahwa dalam proses pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan masyarakat memiliki peran yang sangat penting serta aktif.¹⁹ Dari hal tersebut peneliti dapat memberikan beberapa pandangan dan menemukan beberapa permasalahan yang ada. Sehingga dapat menemukan berbagai solusi atau rekomendasi nantinya.

Kemudian setelah dilakukan penelitian peneliti menemukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan RA Permata hati, Jauharotunnurul

¹⁸ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 250.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD, (selaku kepala RA Permata Hati), pada Kamis, 14 Oktober 2021, di RA Permata Hati.

Janah, S.Pd. AUD. menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di RA Permata Hati tidak bisa dilepaskan dari besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD. menyebutkan bahwa sebagian besar bahkan hampir secara keseluruhan sumber pembiayaan pendidikan RA Permata Hati berasal dari masyarakat khususnya wali siswa dan pengurus serta mereka pun turut dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan terlebih dalam hal pembiayaan. Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD. memberikan contoh bahwa untuk menentukan nominal atau besaran SPP siswa, pengurus di RA Permata Hati mengumpulkan para wali siswa untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, pihak RA memaparkan rencana kebutuhan pembiayaan RA khususnya bagi pembayaran gaji guru serta pendamping. Kemudian, pengurus dan wali siswa bersepakat dan mengambil keputusan bersama terhadap besaran nominal yang harus dibayarkan wali siswa tiap bulannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk laporan dan evaluasi, pengurus pun melaporkan kepada wali siswa terkait pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada saat pertemuan wali siswa khususnya yang berkaitan dengan pembayaran gaji guru serta pendamping. Selain itu juga terdapat beberapa donatur yang memberikan pembiayaan di RA selain dari dana BOS.²⁰

Dari paparan tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh RA Permata Hati untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif di dalamnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati yang diangkat dalam judul penelitian “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati Cilacap”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

²⁰ Hasil wawancara dengan Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD, (selaku kepala RA Permata Hati), pada Kamis, 14 Oktober 2021, di RA Permata Hati.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menyusun batasan masalah sebagai berikut: peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan, peneliti memberikan rumusan masalah: Bagaimana peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu: menganalisis peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dan kepustakaan, serta bisa menjadi bahan referensi bagi yang ingin mengembangkan penelitian dengan mengambil penelitian yang berbeda.
- b. Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan memberi banyak manfaat, yaitu:
 1. Bagi Kepala sekolah, dapat menjadi bahan pertimbangan dan keilmuan maupun pengambilan keputusan/kebijakan dalam pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
 2. Bagi guru, dapat menjadi pertimbangan dan keilmuan maupun pengetahuan secara umum tentang adanya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
 3. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam proses pemenuhan sebagai perannya di RA Permata Hati Cilacap.

E. Sistematika Pembahasan

Alur atau sistematika pada penelitian ini dapat diperjelas seperti di bawah ini:

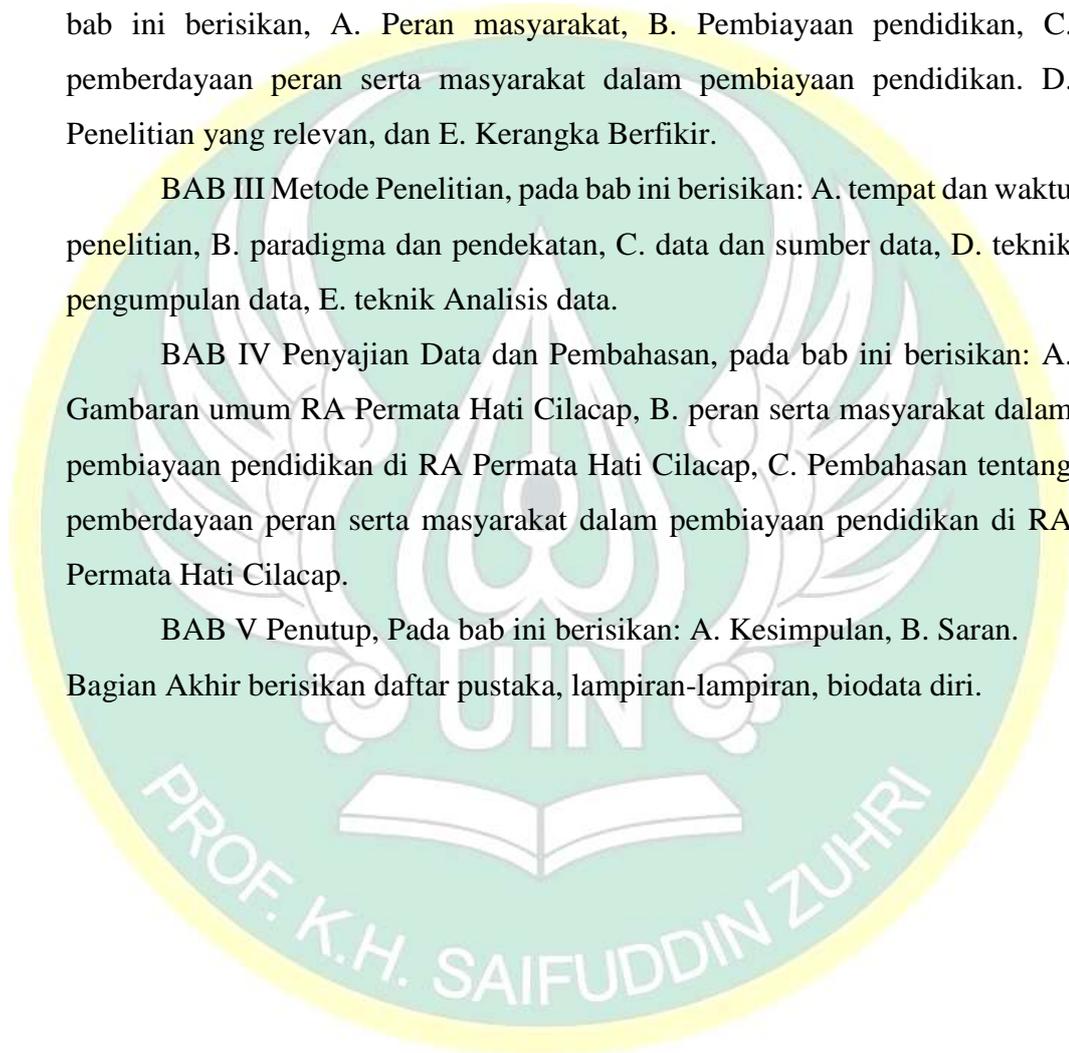
BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika.

BAB II Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, pada bab ini berisikan, A. Peran masyarakat, B. Pembiayaan pendidikan, C. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. D. Penelitian yang relevan, dan E. Kerangka Berfikir.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan: A. tempat dan waktu penelitian, B. paradigma dan pendekatan, C. data dan sumber data, D. teknik pengumpulan data, E. teknik Analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Pembahasan, pada bab ini berisikan: A. Gambaran umum RA Permata Hati Cilacap, B. peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap, C. Pembahasan tentang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisikan: A. Kesimpulan, B. Saran. Bagian Akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, biodata diri.



BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat, maka dari itu peneliti mengkaji teori-teori yang dijadikan dasar pada penelitian tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap

A. Peran Masyarakat

1. Pengertian Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran menurut pendapat Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Peran menurut pendapat Merton adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.²¹ Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat;
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat;
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur social masyarakat.

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan;

²¹ Soekanto Soerdjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 130

- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi, dll;
- c. Organisasi Kerja: bersama setara (berbagai peran);
- d. Penetapan Tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain;
- e. Peran masyarakat: sebagai subyek.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang terhadap harapan dari orang lain yang menduduki status tertentu. Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Peran formal (peran yang Nampak jelas) Adalah sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran informal (peran tertutup) Adalah suatu peran yang bersifat implisit atau emosional biasanya tidak tampak ke permukaan dan untuk menjaga keseimbangan.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Pengertian Masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya.

Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- b. Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;

²² Soehendy, Joesoef, *Partisipasi Masyarakat*, (Jabar: Jetis, 1990), hlm. 28

d. Merupakan suatu sistem hidup bersama.²³

Masyarakat mempunyai masalah yang kompleks, untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan pendidikan. Menurut Tilaar; Fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Pendidikan merupakan karya manusia yang sangat kompleks, berdimensi banyak yang dimulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara, Semuan dimensi tersebut mempunyai saham dalam penentuan dan pengembangan dimensi-dimensi tertentu dalam pendidikan.²⁴

3. Pengertian Peran Masyarakat

Pengertian Peran Masyarakat Peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Peran masyarakat adalah proses untuk:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab;
- b. Mengembangkan kemampuan untuk bisa menyadari akan pentingnya kesehatan. Peran masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya.

Tujuan peran masyarakat untuk:

- a. Meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembagalembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai;

²³ Soekanto Soerdjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 130

²⁴ Tilaar, H.A. *Pendidikan Untuk Masyarakat Baru*. (Jakarta: Grasindo Cipta, 2002), hlm. 26.

- b. Meningkatkan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. Memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif, artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Tuti Budirahayu sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat, meliputi:²⁵

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.

²⁵ Tuti Budirahayu, *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Kendala dan Peluang untuk Meraih Pendidikan yang Layak di Era Otonomi Daerah Paper S-2*

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistemik, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan suatu lembaga dan termasuk lembaga pemerintahan.

4. Bentuk dan tingkat Peran

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu di mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Basrowi sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi nonfisik dan partisipasi fisik.²⁶

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku-buku atau bantuan lainnya. Adapun partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan

²⁶ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 58-59

pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.²⁷ Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi (masyarakat) lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat:

- a. Adanya reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- b. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka
- c. Memperlancar komunikasi antarberbagai potensi lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- d. Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan, dan bekerja bersama-sama dengan rakyat. Kegiatan seperti ini dimulai dari apa yang diketahui dan dimiliki masyarakat dengan cara memberi contoh dan menggunakan pendekatan yang menyatakan bukan sekedar memberi pertolongan.

Adapun menurut Azyumardi Azra, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan, antara lain:²⁸

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan;

²⁷ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,... hlm. 59-60

²⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millennium Baru* (Ciputat: Logos, 2000), hlm. 153

- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah (lembaga pendidikan Islam) yang quality oriented; dan
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan. Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene

Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa partisipasi diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yakni siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Dalam konteks yang pertama dapat dikaitkan dengan mengklasifikasikan berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu :²⁹

- a. Penduduk setempat,
- b. Pimpinan masyarakat,
- c. Pegawai pemerintah, dan
- d. Pegawai asing yang memungkinkan dipertimbangkan dalam suatu aktivitas.

Dalam dimensi kedua memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah masyarakat setempat,
- b. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan,
- c. Saluran partisipasi itu, apakah berlangsung dalam individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil,
- d. Durasi partisipasi,
- e. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara, atau berlanjut dan meluas; memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam

²⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,... hlm. 219.

pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Inti dari suatu partisipasi ialah mengenai “siapa” yang berpartisipasi dan dalam aktivitas “apa” mereka berpartisipasi. Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Berikut rincian keempat jenis partisipasi tersebut:³⁰

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan merupakan hal yang penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya

³⁰ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,... hlm. 219

sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: Pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi.

Ketiga, penjabaran program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur yang turut menentukan keberhasilan program itu sendiri. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah ada penyimpangan.

5. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu beradaptasi dalam tataran yang lebih global. Dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi dan peran pendidikan pemerintah melaksanakan kebijakan desentralisasi khususnya dalam bidang pendidikan. Ada beberapa alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, antara lain : alasan pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, redistribusi kekuatan politik peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.

Pada sisi lain, kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan merupakan tekad dan komitmen bersama (bangsa Indonesia) yang diharapkan dapat menghapus atau paling tidak mengurangi kelemahan-kelemahan reformasi pendidikan pada masa-masa sebelumnya. Reformasi pendidikan di masa-masa sebelumnya lebih memfokuskan pada perubahan system dibanding dengan kelembagaan (sekolah); perbaikan pendidikan lebih menekankan pada ketersediaan input dari sistem dan kurang mengadaptasi kebutuhan masing-masing sekolah karena sekolah dianggap mempunyai karakteristik yang umum.

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dikembangkan tidak terbatas sampai di tingkat kabupaten/kota tetapi mencakup saluan pendidikan (sekolah) melalui program utama Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS). Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumberdaya dengan pelibatan peranserta masyarakat dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Dalam spectrum yang lebih luas MPMBS merupakan konsep pengelolaan pendidikan yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk berbagi peran serta tanggungjawab untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan *resources* sekolah yang ada.

Dalam kerangka penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah, sekolah saat ini sedang dihadapkan pada masalah peningkatan mutu dan masa depan siswa dalam menjalani kehidupannya. Menurut Dirjen Dikdasmen masalah yang dihadapi sekolah di atas dapat dijabarkan dalam beberapa item yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, antara lain : peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; perluasan kesempatan memperoleh pendidikan; kesesuaian hasil pendidikan dengan kepentingan pembangunan nasional, masyarakat dan

individu; pengelolaan pendidikan memerlukan keterpaduan dari berbagai pihak, meningkatkan keterbatasan dana dan sumber daya manusia; ketepatan antara rencana dengan pelaksanaan.

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi (berperan serta) dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat baik dalam wawasan kependidikan maupun meningkatkan kemampuan kinerjanya. Karenanya dalam rangka peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan merata perlu adanya upaya peningkatan, baik dalam hal wawasan maupun kesadaran untuk terlibat aktif. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tetapi juga melekat kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam usaha-usaha menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyusunan program kerja sekolah termasuk dalam implementasinya. Hal ini memiliki relevansi dengan penjabaran operasional Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kemampuan dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

- a. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat;

- b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan;
- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik;
- d. Melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka;
- e. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya;
- f. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Tujuan dari pemberdayaan menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.³¹ Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Menurut Kartasmita mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai:³²

- a. Sarana untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan

³¹ Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta : Gaya Media, 2004), hlm. 40.

³² Kartasmita, Ginanjar, *Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (PT. PUSTAKA Cindesindo. Jakarta, 1995), hlm. 95

asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik maupun social.

Menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama dan budaya.³³ Menurut Michael Fagence, menyebutkan peran adalah “Peran masyarakat serta penduduk bermakna pengorbanan sedikit waktu, sedikit uang, sedikit pengertian dan sedikit kesabaran.”

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian pemberdayaan tersebut, antara lain:

- a. Aksesibilitas informasi
- b. Keterlibatan atau partisipasi.
- c. Akuntabilitas
- d. Adanya rasa tanggung jawab

Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Desa merupakan faktor yang sangat penting. Peran masyarakat bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan Desa, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

6. Indikator Peran Masyarakat

³³ Widjaja, AW, *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, cetakan pertama, (Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 2003), hlm. 169.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:³⁴

- a. Kontribusi atau dedikasi stakeholders meningkat dalam hal jasa (pemikiran/ keterampilan), finansial, moral, dan material atau barang
- b. Meningkatnya kepercayaan stakeholders kepada lembaga pendidikan.
- c. Meningkatnya tanggung jawab stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
- e. Meningkatnya kepedulian stakeholders terhadap setiap langkah yang dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu.
- f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga pendidikan benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat stakeholders serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Mulyasa sebagaimana yang dikutip oleh Marza menyebutkan bahwa indikator partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan di antaranya:

- a. Adanya saling pengertian antara sekolah atau lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat termasuk dunia kerja.
- b. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing.
- c. Adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga serta ikut

³⁴ Sri Suharyati, "Partisipasi Keluarga Miskin dan Manajemen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Banjarnegara" Tesis, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hlm. 25

³⁵ Marzal, "Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Yogyakarta II" Tesis, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hlm. 41.

bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut.

Dari beberapa indikator partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, terdapat titik tengah atau kesamaannya yakni adanya pengertian, kepedulian, dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah atau lembaga pendidikan dengan masyarakat, baik dalam hal materi maupun nonmateri demi peningkatan kualitas pendidikan.

7. Upaya Peningkatan Peran Masyarakat

Secara umum terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, yakni:³⁶

- a. Learning process (learning by doing) Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas program sekaligus mengamati dan menganalisa kebutuhan serta keinginan masyarakat.
- b. Institusional development Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial
- c. Participatory Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat.

Selain tiga prinsip di atas, untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:³⁷

- a. Menawarkan hadiah kepada masyarakat yang mau berpartisipasi sesuai dengan kuantitas dan tingkatan partisipasinya

³⁶ Arifudin Sahidu. "Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat" Disertasi, (Bogor: IPB, 1998), 147.

³⁷ Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 82-83.

- b. Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, seperti dengan membayar denda, pemberian hukuman, dan kerugian bagi yang melanggar.
- c. Melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pendidikan yang telah dimusyawarahkan, justru hal tersebut akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- e. Mengaitkan masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik
- f. Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pendidikan yang dicanangkan agar masyarakat yang menjadi pengikutnya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- g. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa terdapat banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- h. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah sebagai pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ataupun kegiatan yang telah dirumuskan, antara lain:

- a. Jika kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- b. Kurang mengikatnya kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijakan yang sangat mengikat dan ada pula kebijakan yang tidak begitu mengikat kepada masyarakat. Kebijakan yang sangat

mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas, sedangkan kebijakan yang tidak begitu mengikat umumnya tidak terlalu dipatuhi.

- c. Adanya ketidakpastian hukum, baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun pasif.
- d. Jika kebijakan yang ada terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis, maka hal tersebut bisa menjadi penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil.
- e. Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan bersama.
- f. Rumusan kebijakan tidak jelas dan mungkin antara satu kebijakan dengan kebijakan lain terlihat bertentangan. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi.

8. Faktor Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Motivasi Menurut Hamzah B. Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.
- b. Kebijakan Pemerintah Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.³⁸.

9. Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

³⁸ Soekidjo, Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 9-10

- a. Anggaran Menurut Munandar adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- b. Sarana dan Prasarana Menurut Soepartono yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.³⁹

Upaya menumbuhkan prakarsa dan peranserta masyarakat yang berkaitan dengan keputusan pengelolaan pendidikan hendaknya diambil dan bertumpu pada sekolah serta masyarakat. Usaha ini diharapkan mampu mendorong kemajuan sekolah tanpa meninggalkan nilai-nilai setempat dengan memperluas basis mitra sekolah.

Menurut Supriono dan Achmad ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan, mulai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi, antara lain:

- a. Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan jasa pelayanan yang tersedia. Misalnya memasukkan anak ke sekolah.
- b. Peran serta memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga.
- c. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti membina secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalnya BP3 memutuskan orang tua membayar iuran bagi setiap anak sekolah dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhi.
- d. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya kepala sekolah berkonsultasi dengan BP3 tentang program

³⁹ Soepartono, *Sarana dan Prasarana*. (Jakarta : Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah), hlm. 12.

sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan anak-anak mereka.

- e. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain. Misalnya BP3 dan orang tua murid mewakili sekolah bersama dengan puskesmas mengadakan penyuluhan tentang perlunya menjaga gizi anak dalam pendidikan, sarapan pagi sebelum ke sekolah dan sebagainya.
- f. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelcgasikan. Misalnya sekolah mc Minta BP3 dan orang tua murid tertentu memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, mencatat anak usia sekolah dan sebagainya.
- g. Peranserta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Misalnya BP3 / orang tua murid ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan sekolah, baik kegiatan maupun pendanaannya.⁴⁰

Jadi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah partisipatif maupun sebuah pemanfaatan masyarakat dalam keterlangsungan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan.

Seseorang akan berpartisipasi terhadap sesuatu yang mana dalam hal ini dikonotasikan sebagai suatu perwujudan perilaku seorang terhadap suatu objek kegiatan. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Herbert Blumer dalam Irving M. Zeitlin yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum⁴⁰ bahwa respon faktor, baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau pemaknaan setiap objek tindakan. Pokok pikiran Blumer dalam menjabarkan pemikiran interaksionalisme simbolis menyebutkan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap suatu objek tindakan, Thomas dalam K. Sunarto mengatakan bahwa tindakan

⁴⁰ Supriono S. dan Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah, ...,* hlm. 14.

seseorang selalu didahului oleh suatu tahapan penilaian dan pertimbangan untuk memperoleh makna atas objek tindakan.

Homans dalam Irving M. Zetlin sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum⁴¹ menjelaskan bahwa perilaku sosial berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman dari pihak lain. Titik berat teori Homans ini terfokus pada aspek psikologis dan motivasi individu. Apabila hal tersebut dikaitkan pada eksistensi agama, maka agama dapat dijadikan sebagai sumber motivasi dalam berperilaku sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Sunhaji⁴² bahwa: *In religious humanism, normative-religious awareness is the one on a person to believe the existence that religion provides a set of guidance. One's existence in his or her community is based on religious belief. Human being is aware that his or her potential is limited so that external authority (religion) becomes a source of motivation.*

Dalam tindakan sosial termasuk kaitannya dengan partisipasi masyarakat ini seyogyanya selalu didasarkan pada empat proposisi, yaitu: 1) Proporsi keberhasilan, Semakin positif respon yang diterima, maka makin sering tindakan tersebut dilakukan. 2) Proporsi stimulus, Jika terdapat kesamaan stimulus yang menguntungkan, maka semakin besar pengulangan tindakan dilakukan. 3) Proporsi nilai, Semakin bermakna hasil yang diterima, maka semakin sering tindakan tersebut diulangi. 4) Proporsi berjenuh-kerugian, Semakin sering menerima respon yang istimewa, maka respon tersebut makin berkurang nilainya.

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat, antara lain: 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. 2) Aspek-aspek tipologis (pembuktian). 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya). 4) Demografis (jumlah penduduk). 5) Ekonomi (desa miskin/ tertinggal)

B. Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Adapun menurut Dedi Supriadi biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan tenaga.⁴¹ Abuddin Nata menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya.⁴²

Mulyasa menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.⁴³

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa.

⁴¹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

⁴² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 219.

⁴³ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 194.

Secara bahasa, biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah.

Menurut Levin pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Nanang Fattah biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.

Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para

pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan.

Biaya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *cost, financial, expenditure*. Biaya menurut Usry dan Hammer dalam Akdon adalah sebagai *cost as an change, a forging, a sacrifice made to secure benefit*. *Cost* sinonim dengan *expense* yang digunakan untuk mengukur pengeluaran (*outflow*) barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan.⁴⁴ Biaya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran dalam satuan mata uang yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam biaya, yaitu: 1) merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 2) diukur dalam satuan uang; 3) telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; dan 4) pengorbanan untuk tujuan tertentu.⁴⁵ Adapun menurut Yahya dalam Mulyono tentang konsep biaya pendidikan menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan suatu unsure yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara fisien dan efektif.⁴⁶

Kegiatan pembiayaan adalah usaha memperoleh modal untuk membiayai aktifitas yang dilakukan. Dalam buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah istilah pembiayaan meliputi penyiapan anggaran, penatausahaan, perpajakan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan untuk dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Sehingga manajemen keuangan

⁴⁴ Akdon, etc all., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5

⁴⁵ Ferdi WP., *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis*, (Jakarta: Puslitjak, Balitbang, kemendikbud, 2011), hlm. 568

⁴⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Grup, 2010), 81

merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi.⁴⁷ Menurut Langevell pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak.⁴⁸

Selanjutnya dalam Retnanto Ki Hajar Dewantoro menyatakan⁴⁹ Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu, atau pengetahuan, serta juga memberikan kecakapan pada anak-anak. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan.⁴⁹ Pendidikan merupakan pergaulan manusiawi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan hidup menurut nilai-nilai tersebut. Mulyasa menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.⁵⁰ Maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah aktivitas yang berkenaan dengan usaha untuk memperoleh dana yang dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.

⁴⁷ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kementerian agama, Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah*,... hlm. 162

⁴⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 13

⁴⁹ Agus Retnanto, *Sistem Pendidikan Islam Terpadu*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), hlm. 18

⁵⁰ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 194

Biaya pendidikan memegang peran yang penting di dalam keberlangsungan hidup dunia pendidikan. Biaya (cost) merupakan salah satu komponen masukan (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara bahasa biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, atau dalam istilah ekonomi berarti biaya/pengeluaran yang berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.⁵¹

Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Dedi Supriadi, biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat diharga dengan uang). Panduan Fasilitasi Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Penyusunan Kebijakan menyebutkan bahwa biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang maupun uang yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Abbas Ghozali mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, oleh karenanya untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Atau dengan kata lain, pembiayaan pendidikan merupakan upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan

⁵¹ . Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 194

pengembangan sektor pendidikan. Dari berbagai pendapat tentang biaya pendidikan di atas dapat ditarik pengertian umum bahwa biayapendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa, dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan merupakan sebuah tata kelola dalam penggunaan uang, barang atau materi lainnya dalam sebuah pendidikan demi keterlangsungan pendidikan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:⁵²

- a. Biaya Langsung (*direct cost*), Biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan Biaya rutin (*recurrent cost*). Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah.
- b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya, biaya pengeluaran yang

⁵² A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen sumber daya manusia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 30.

tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain:

- 1) Biaya Pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya.
- 2) Biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi).
- 3) Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan

3. Sumber-sumber Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah.
- b. Kemudian dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan Pemerintah; bantuan pemerintah daerah; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; bantuan lembaga lain yang

tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau sumber lain yang sah.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut dikategorikan menjadi lima yaitu:⁵³

- a. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan)
- b. Dana penunjang pendidikan (DPP)
- c. Bantuan/sumbangan dari BP3
- d. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada)
- e. Bantuan lain-lain

Karakteristik Pembiayaan Pendidikan Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi:
 - 1) Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - 2) Unit *cost* setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.
 - 3) Unit *cost* sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar
- b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “*human investment*”, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia
- c. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.

⁵³ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen sumber daya manusia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 54.

- d. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum.
- e. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun

Komponen Biaya Pendidikan Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Hallak menjelaskan bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. Komponen-komponen yang dimaksud adalah:

- a. Peningkatan KBM
- b. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa
- c. Pembinaan tenaga kependidikan
- d. Rumah tangga sekolah
- e. Pengadaan alat-alat belajar
- f. Kesejahteraan
- g. Pengadaan bahan pelajaran
- h. Perawatan
- i. Sarana kelas
- j. Pengadaan alat-alat belajar
- k. Sarana sekolah
- l. Pembinaan tenaga kependidikan
- m. Pembinaan siswa
- n. Pengadaan bahan pelajaran
- o. Pengelolaan sekolah,
- p. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan
- q. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan.
- r. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan
- s. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

4. Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu:⁵⁴

Pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian penggunaannya, pertanggungjawabannya jelas, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketiga, efektifitas. Efektifitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dan mengelola dana yang tersedia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan pendidikan.

Keempat, efisiensi. Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

5. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* adalah satu kesatuan yang terdiri komponn atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian- bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item- item penggerak. Menurut Jerry FitzGerald sistem adalah suatu jaringan kerja

⁵⁴ Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 87.

dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar dapat menjalankan suatu kejadian atau mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Jadi sistem adalah suatu aktifitas pelaksanaan dan penerapan suatu pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga biasa dikenal dengan keuangan. Berkaitan dengan pembiayaan, maka sistem keuangan pada penelitian ini adalah srangkaian aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga pendidikan/ yayasan dalam rangka mengoptimalkan keuangan pada lembaga pendidikan.

6. Mekanisme Sistem Keuangan

Secara teoritik mekanisme sistem keuangan pendidikan disusun dengan tujuan agar operasioanlisasi pendidikan lebih terukur dan mencapai aspek- aspek yang semestinya dibutuhkan. Adapun mekanisme keuangan secara teoritis meliputi perencanaan finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagaimana menurut Jones yang dikutip oleh E Mulyasa mengemukakan “ *Financial planning is called budgeting* “ merupakan kegiatan koordinasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistmatis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.⁵⁶ Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (auditing).⁵⁷

7. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

⁵⁵ <http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-definisi-sistem.html> diunduh pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 08.30 WIB

⁵⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2007), hlm. 49

⁵⁷ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 109

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁵⁸ kegiatan ke dua dalam manajemen pembiayaan adalah akuntansi, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mengembangkan hasil kegiatan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan konversi (perubahan) sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang bisa dipakai. Oleh karena itu accounting berkaitan dengan mengukur dan menyingkap hasil dari kegiatan konversi sumber daya tadi. Seperti yang dikatakan dalam bukunya E. Mulyasa, dalam pelaksanaan keuangan madrasah ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan keuangan madrasah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah.

Sedangkan untuk pengeluaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan seefisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhankebutuhanyang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah.

Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam dua kegiatan berikut:

- a. Penerimaan, pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.

⁵⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70

- b. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien.⁵⁹

8. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.⁶⁰ Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang hasilnya sangat diperlukan oleh pimpinan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi keadaan di masa akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, dan penyempurnaan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Pada tahap evaluasi, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau persemester.

Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dari tahap evaluasi ini, muncullah tahapan auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang.⁶¹

Audit merupakan review terhadap transaksi- transaksi finansial untuk menjamin akurasi, kelengkapan, legalitas, dan kesesuaiannya

⁵⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah "Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri"*, (Jakarta: ArRuz Media, 2012), hlm. 239- 240

⁶⁰ Ashar Arsyad, *Pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 20

⁶¹ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 198.

dengan pelaksanaan di lapangan. Auditing merupakan fase terakhir dalam siklus manajemen keuangan. Agar audit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ditetapkan suatu standar audit yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa proses evaluasi ini dilakukan untuk agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Disinilah seorang kepala sekolah harus memantau dan menilai hasilnya.

C. Peran Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan

Masyarakat merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi sekolah, di mana semua siswa yang berada di sekolah berasal dari masyarakat. Pada dasarnya sekolah selalu berada di tengah masyarakat yang situasi sosialnya dapat merangsang untuk beraktivitas dan berinovasi. Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan, sebab di era reformasi sekarang ini terjadi perubahan yang fundamental dalam pemberdayaan (*empowering*) masyarakat yang dilandasi transfer nilai-nilai filosofik dan teoritik. Hal ini memerlukan perhatian yang serius karena pendidikan dalam masyarakat dilihat dari hakikatnya akan terjadi paling dinamis, sehingga pendidika disekolah dan dalam keluarga cenderung untuk tidak dapat mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika masyarakat tidak dapat dihambat sebaliknya dinamika dalam sekolah relatif dipercepat

Proses pendidikan dalam masyarakat berlangsung dengan sangat terbuka dan tanpa batas, tidak steril dan dapat berdampak positif maupun negatif. Pemegang kekuasaan di masyarakat hanya mampu memberi pagar dalam bentuk rambu-rambu umum yang berupa hukum dan peraturan. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat merupakan satu pilar yang penting dalam mengatasi persoalan tersebut. Bila sudah ada jalinan kerjasama antara

sekolah dengan masyarakat, maka kerjasama tersebut harus terus dibina, ditingkatkan dan dikembangkan untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan efektif. Kerjasama yang dijalin harus bersifat saling menguntungkan, artinya dari hasil kegiatan tersebut kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan. Sehubungan dengan kerjasama antara sekolah dan masyarakat tersebut, menurut Tilaar hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Inti partisipasi adalah kemitraan (*partnership*) yaitu kesetaraan dan kebersamaan oleh pengembangan konsensus berbagai hal.
2. Adanya kemamfaatan dan keuntungan bersama para partisipan, dalam arti unsur merugikan atau pihak secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kadar partisipasi.
3. Memberikan suara (*voice*) memberikan peluang hadirnya partisipasi pengakuan keberadaan dan hak orang lain sangat penting untuk mengundang partisipasi mereka.
4. Manajemen terbuka dan transparan merupakan prinsip untuk mengundang dan memelihara partisipasi pendidikan masyarakat dan orang tua.
5. Baling mempercayai (*mutual trust*) menjadi jiwa partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua.
6. Akuntabilitas tidak bisa diabaikan dalam partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua.
7. Agar partisipasi hadir berkembang dan berkesinambungan, informasi yang benar, tepat waktu dan bermakna luas tersedia dan disebarluaskan.
8. dan Inti lainnya selalu mengusahakan dan membangun pelayanan yang baik semakin baik, orang terus ingin berpartisipasi oleh adanya pelayanan yang baik.⁶²

Anggota masyarakat yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya bersifat sukarela, karena sadar akan adanya keharusan untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan' untuk memupuk kemampuan berinovasi sebagai persiapan untuk menyongsong masa depan, yang harus dilakukan secara kolektif oleh segenap lapisan masyarakat. Bagi suatu masyarakat besar kecilnya kemampuan berpartisipasi dalam rangka tidak terletak pada jumlah anggota masyarakat yang dapat dikerahkan, tetapi

⁶² H.A.R. Tilar, *Paradigma Baru, Pendidikan Nasional*, (Renika Cipta, 2004), hlm. 67

besar kecilnya daya partisipasi ini lebih dicerminkan oleh besar kecilnya kesadaran bersama yang terdapat dalam masyarakat untuk memperbaharui hal-hal tertentu demi kepentingan bersama. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan setiap sekolah adalah mendidik para siswanya untuk menjadi orang-orang yang lebih pandai sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia serta taat pada ajaran agamanya. Dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi lingkungan dan mempunyai kecakapan hidup, maka dalam melaksanakan program sekolah masyarakat dituntut sertakan tokoh-tokoh dari setiap aspek kehidupan masyarakat seperti dari dunia perusahaan pemerintahan, agama, politik dan sebagainya diminta untuk bekerja dengan sekolah dalam proyek perbaikan masyarakat.

Selama ini peran publik terhadap pengelolaan sumber dana pendidikan lebih banyak terfokus pada penyediaan atau sumber pendapatan. Contoh bentuk partisipasi tersebut antara lain:

1. memberikan hibah berupa tanah, bangunan, atau fasilitas lain; hal ini dilakukan masyarakat atas dasar nilai atau kepercayaan yang dianutnya,
2. memberikan subsidi dana/iuran pendidikan; dilakukan atas dasar kewajiban,
3. kerjasama dunia usaha dengan pihak sekolah; dilakukan atas dasar tanggungjawab sosial dan kepedulian.⁶³

Subsidi silang antara siswa kaya dengan siswa miskin dapat diterima orangtua siswa sebagai suatu hal yang masuk akal karena meyakini nilai yang sama, bahwa merupakan kewajiban bagi yang mampu untuk menolong yang kurang mampu. Belajar dari hal tersebut, dunia usaha patut untuk digugah terus menerus bahwa keberlangsungan ia sebagai lembaga usaha akan terpengaruh juga dengan ada/tidak adanya generasi penerus yang terdidik. penganggaran partisipatif dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. analisa dan formulasi anggaran,
2. penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan

⁶³ Adi Dewanto dan Rahmania Utari, Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.

3. penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Tentunya penganggaran ini diharapkan tidak berhenti pada saat perencanaan, melainkan juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Lebih jauh lagi diharapkan pelibatan stakeholders akan lebih menggugah peningkatan dukungan dan pengorbanan mereka. Perlu diketahui, penganggaran partisipatif telah dilakukan di tingkat nasional oleh beberapa negara antara lain Irlandia. Hasilnya ternyata sangat positif bagi perekonomian negara tersebut. Hingga kini bahkan Irlandia memiliki mitra sosial yang tergabung dalam Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional yang mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Selain keadaan ekonomi makro yang kian membaik, terbangun pula modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat.

Jika sistem tersebut diadopsi ke level yang lebih mikro seperti halnya sekolah, peluang yang dapat diciptakan antara lain:

1. tersadarkannya lagi masyarakat akan keterbatasan sumber dana yang diperoleh sekolah sehingga mereka tidak segan-segan memberikan kontribusi finansial terhadap sekolah,
2. pelayanan sekolah dapat terus diperbaiki karena keterlibatan masyarakat dapat sangat efektif dalam menemukan solusi pengelolaan sumber dana agar dapat digunakan secara efisien.⁶⁴

Jadi dalam perannya masyarakat dalam pembiayaan pendidikan bisa dikatakan sebagai hal yang penting demi keterlangsungan sebuah pendidikan dan lembaga pendidikan.

D. Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan beberapa penelitian peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA

⁶⁴ Adi Dewanto dan Rahmania Utari, Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.

Permata Hati Cilacap. Temuan penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti meliputi:

Tesis Bustanul Arifin disusun tahun 2016 yang berjudul Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Ngarayudan Jogrogan Ngawi). Adapun masalahnya adalah 1) Bagaimana peran masyarakat dalam wadah komite untuk meningkatkan mutu pendidikan, 2) Bagaimana peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian 1) untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai peran masyarakat dalam wadah komite untuk meningkatkan mutu pendidikan, 2) untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Kesimpulan penelitian adalah 1) peran masyarakat dalam wadah komite untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai pengambil keputusan, pelaksana, evaluasi dalam pengadaan fasilitas, 2) peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai pendukung bantuan, mediator, pengawasan dan evaluasi.⁶⁵

Tesis Deni Rohendi disusun tahun 2002 yang berjudul Strategi Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (Kajian pada Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung Tahun 2001). Permasalahan pola pendidikan, konsep dan strategi, langkah strategis, hasil yang diterima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah

⁶⁵ Bustanul Arifin, Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Ngarayudan Jogrogan Ngawi), *Tesis*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Kesimpulannya adalah perlu adanya standar evaluasi personal maupun lembaga, adanya pengelolaan dana zakat, peningkatan SDM, Bisa dijadikan role model.⁶⁶

Tesis Sutrimo Purnomo disusun tahun 2017 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Permata Hati Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati bersifat fungsional religius kultural dengan tahapan pembiayaannya, meliputi: *Pertama*, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat yang berasaskan musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. *Ketiga*, evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan

⁶⁶ Deni Rohendi, Strategi Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (Kajian pada Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung Tahun 2001), *Tesis*, (Bandung: UPI, 2002).

dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran belanja dan realisasi penggunaannya dengan prinsip transparansi anggaran.⁶⁷

E-jurnal IAI Ngawi Mustaqim disusun tahun 2019 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, kesimpulannya adalah 1) Menerapkan manajemen sekolah dengan transparan dan akuntabel untuk memenuhi harapan masyarakat dengan bekerja penuh semangat, konsisten dan fokus pada prestasi anak; menggelar kegiatan penunjang dan penggalangan dana secara langsung melalui Komite Sekolah. 2) Masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan program kerja. Komite sekolah sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat juga telah berperan dan berfungsi aktif. Selain komite *stakeholders* juga berperan serta dalam penyusunan program kerja. 3) Masyarakat berperan serta terutama melalui wadah komite mengevaluasi kinerja, proses dan hasil pelaksanaan program kerja sekolah dan alokasi dana sekolah.⁶⁸

Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Adi Dewanto dan Rahmania Utari disusun tahun 2006 yang berjudul Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, Pemberdayaan modal sosial bukan dimaknai sebagai aksi mengeksploitasi masyarakat sebagai sumber dana sekolah, namun lebih kepada bagaimana sekolah bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola modal sosial yang ada pada masyarakat/stakeholders. Diperlukan kesediaan dan kemampuan yang baik dari pihak pimpinan sekolah untuk melibatkan unsur di luar masyarakat bukan hanya sebagai kontributor dana, melainkan juga perencana jalannya pembiayaan pendidikan. Perlu pula ditumbuhkannya optimisme pada pihak sekolah bahwa modal sosial yang ada itu melimpah, namun untuk efektivitas termanfaatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu yang memerlukan tidak hanya keterampilan teknis namun juga keterampilan sosial. Seiring dengan

⁶⁷ Sutrimo Purnomo. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), *Tesis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

⁶⁸ Mustaqim, Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal*, diakses pada 15 Oktober 2021, (<https://e-journal.iaingawi.ac.id>.)

masih terbatasnya kemampuan sekolah untuk menerapkan MPMBS secara penuh, Pemerintah tidak cukup hanya dengan meyakinkan sekolah untuk menerapkan pola manajemen tersebut namun juga memberi pelatihan atau pengetahuan yang cukup bagi pimpinan sekolah untuk dapat mengatasi konsekuensi pola MPMBS yang satu diantaranya adalah kemandirian dalam pendanaan pendidikan. Pada aspek ini pemerintah tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan memberdayakan sekolah-sekolah yang telah mampu mengembangkan sumber-sumber pendapatannya, dan juga kalangan perguruan tinggi yang dapat melakukan pelatihan, pendampingan maupun penelitian.⁶⁹

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Agus Wibowo dengan judul Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap) dijelaskan beberapa temuan sebagai berikut: 1. Jenis-jenis partisipasi yang dibutuhkan sekolah dari masyarakat adalah tenaga, pikiran, uang, fasilitas, dan barang yang dimiliki masyarakat, 2. Unsur-unsur masyarakat yang berpartisipasi adalah wali murid, lembaga desa, Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Minomartani, pemuka masyarakat dan tokoh agama, 3. Pembuatan program perencanaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui langkah-langkah awal yaitu analisis permasalahan yang muncul, analisis potensi yang dimiliki, dan analisis kebutuhan, kepentingan atau kemauan masyarakat, 4. Teknik-teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah mengakui keberadaan masyarakat dengan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas kegiatan sekolah, menumbuhkan rasa memiliki, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menyebarluaskan segala kelebihan atau kekuatan yang dimiliki sekolah, melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan sekolah, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk selalu memberikan saran, masukan,

⁶⁹ Adi Dewanto dan Rahmania Utari, Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.

ataupun kritik kepada sekolah, 5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam taraf placation, 6. Hasil dan dampak dari partisipasi masyarakat dapat dirasakan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri.⁷⁰

Diana Sufa Rahmawati dalam risetnya yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor* menyebutkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, di antaranya komite sekolah dan orang tua mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah seperti dalam penyusunan perencanaan dan keputusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan pendidikan hingga dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan. Adapun upaya SDN Cibeusi untuk memberdayakan masyarakat ialah dengan meminta kritikan, saran dan masukan dari orang tua dan masyarakat sekitar, penyusunan dan pengesahan RAPBS bersama komite sekolah serta sekolah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan komite dan orang tua siswa tentang program sekolah dan tingkat kemajuan/perkembangan siswa. Namun, hal berbeda ditemukan di SDN Jatinangor, yakni adanya kecenderungan partisipasi masyarakat yang rendah di sekolah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan yakni hampir tidak ada atau boleh dikatakan tidak ada partisipasi dalam bentuk dana dan material. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, tetapi memang kecenderungan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang lemah sehingga pihak sekolah merasa tidak berdaya ketika harus meminta partisipasi dalam bentuk materi, namun partisipasi dalam bentuk lain seperti tenaga dan saran masih tetap diberikan masyarakat kepada pihak sekolah.⁷¹

Sitti Roskina Mas dalam tulisannya yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan*

⁷⁰ Agus Wibowo, "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)" Tesis, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015).

⁷¹ Diana Sufa Rahmawati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor" Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011)

menyebutkan bahwa peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Secara khusus ditekankan pula bahwa komite sekolah harus mampu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan suasana serta kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.⁷²

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan dengan judul *Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB)* menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam pengembangan pondok pesantren tersebut tidak hanya sebatas pada pemikiran dan tenaga semata, namun juga bantuan dalam bentuk pendanaan.⁷³

Dalam penelitian lain dengan judul *Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda* oleh Muhammad Iwan Abdi menjelaskan bahwa ditemukan adanya fakta tentang kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya partisipasi masyarakat bag pengembangan sekolah. Hal ini menyebabkan eksistensi masyarakat terabaikan. Untuk itu, perlu membangun persepsi bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, sehingga diharapkan muncul kesadaran sekolah untuk dapat mulai membangun kerjasama dan partisipasi aktif dan positif dengan masyarakat.⁷⁴

⁷² Sitti Roskina Mas, "Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan", *Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang* (tt.)

⁷³ Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB)", *Jurnal Kependidikan IKIP Mataram* 14, (2015)

⁷⁴ Muhammad Iwan Abdi, "Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda", *Jurnal Fenomena STAIN Samarinda* 4, no. 2 (2012)

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Bustanul Arifin disusun tahun 2016 yang berjudul Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Ngarayudan Jogrogan Ngawi)	1. Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya	1. Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. 2. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan dan peran. 3. Variabel disini berbeda yaitu mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan
Deni Rohendi disusun tahun 2002 yang berjudul Strategi Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (Kajian pada Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung Tahun 2001)	9. Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya 10. Sama dalam variabel pembiayaan pendidikan dan pembiayaan	1. Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. 2. Variabel disini berbeda yaitu strategi pemberdayaan dan pemberdayaan 3. Tingkat pendidikan berbeda yaitu RA (formal) dan Pondok (non formal)
Sutrimo Purnomo disusun tahun 2017 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan	11. Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya	4. Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda.

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Permata Hati Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas),	12. Sama dalam variabel pembiayaan pendidikan	5. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan dan partisipasi 6. Tingkat pendidikan berbeda yaitu RA (formal) dan RA (non formal)
E-jurnal IAI Ngawi Mustaqim disusun tahun 2019 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	1. Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya	1. Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. 2. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan dan partisipasi 3. Variabel disini berbeda yaitu mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Adi Dewanto dan Rahmania Utari disusun tahun 2006 yang berjudul Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah	1. Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya 2. Variabelnya sama pembiayaan	1. Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. 2. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat
Agus Wibowo dengan judul Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan	Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya	Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda.

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)	Variabelnya sama pembiayaan	Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat
Diana Sufa Rahmawati dalam risetnya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor	Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Variabelnya sama pembiayaan	Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat
Sitti Roskina Mas dalam tulisannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan	Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Variabelnya sama pembiayaan	Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat
Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di	Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Variabelnya sama pembiayaan	Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB)		pemberdayaan masyarakat
Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda oleh Muhammad Iwan Abdi	Metode penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Variabelnya sama pembiayaan	Subjek dan tempat penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. Variabel disini berbeda yaitu pemberdayaan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan penelitian beberapa peneliti terdahulu, menunjukkan bahwasanya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dari hasil tersebut, maka peneliti menerapkannya pada penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

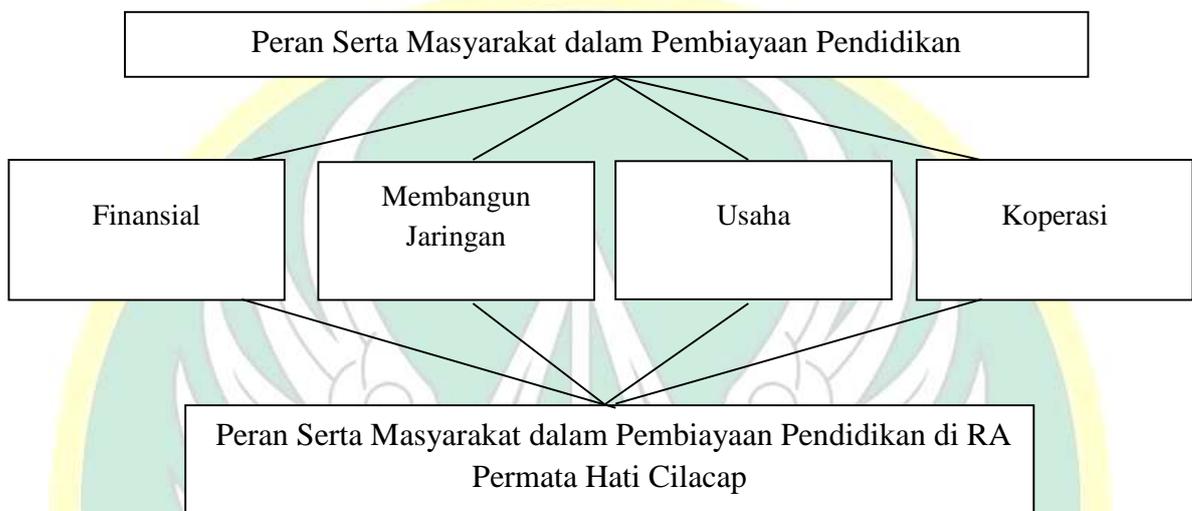
Siti Irene Astuti Dwiningrum menguatkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah.⁷⁵ Dari apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa keterlibatan orang tua atau wali siswa dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Semakin besar dana

⁷⁵ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat...*, hlm. 250.

yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali setidaknya menunjukkan semakin besar pula partisipasinya dalam mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Gambar 1.

Skema Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan



Proposal tesis Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati Cilacap, yang berlandaskan pada pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, karena pemberdayaan masyarakat dan biaya pendidikan itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dihasilkan dari proses kajian yang dilakukan oleh kepala sekolah, komite dan masyarakat dengan memperhatikan standar sekolah dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Diantara yang dibutuhkan adalah pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan adalah finansial, membangun jaringan, usaha, dan koperasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan arah dan petunjuk yang tepat dalam memecahkan masalah yang peneliti ajukan pada bagian di atas maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Paradigma memiliki arti suatu kumpulan pemahaman dari berbagai pendapat yang diakui tidak hanya satu pihak, akan tetapi diakui oleh banyak pihak, kerangka atau proporsi yang membuat alur lebih terarah dan lebih baik.⁷⁶ Paradigma yang digunakan oleh peneliti ialah paradigma alamiah. Paradigma alamiah berpendapat fenomena memiliki ciri interaktif.⁷⁷ Jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian yang terjun ke lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun ke lapangan menemui responden.⁷⁸ Metode penelitian ialah sebuah cara yang dibuat secara ilmiah dengan tujuan menemukan data tertentu.⁷⁹

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan berupa kata-kata, lisan, maupun tingkah seseorang. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan dari fenomena ataupun peristiwa yang ada dengan penjabaran kata-kata.⁸⁰

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), hlm. 49.

⁷⁷ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 55.

⁷⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.5.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet ke-22*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 2.

⁸⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 54.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di RA Permata Hati Cilacap, dengan alasan sebagai berikut: RA Permata Hati Cilacap sudah terdapat peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap namun untuk peningkatan kinerja guru serta pendidikan masih belum maksimal, dan RA Permata Hati Cilacap merupakan sekolah yang memiliki titik akses yang jauh dari jalan kabupaten.

Penelitian ini dilakukan pada Januari 2022 sampai Mei 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan deskriptif kualitatif diutamakan dengan menemukan indikator yang ada. Dalam menemukan informasi dan indikator yang ada, pengumpulan data lebih pada metode pengumpulan data berupa interview, dokumentasi, dengan analisa terfokus pada mendengarkan, melihat, berinteraksi, bertanya, berbicara, mengeksplora, mencatat catatan penting tentang hal yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap.⁸¹

Dalam penelitian ini untuk metode pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Dari pengumpulan data tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Observasi ialah pengamatan secara langsung terhadap objek yang berada pada tempat terjadinya penelitian. Teknik observasi berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, peristiwa, dan respon tertentu.⁸² Teknik ini dipakai untuk menguatkan data yang telah ditemukan atau telah ada. Dalam hal ini observasi dilakukan secara terbatas, namun observasi berfokus pada bagaimana peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap, melakukan observasi pada kepala sekolah, wali murid, dan siswa.

⁸¹ Noeng Muhaji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV (Yogyakarta: Rake Sarusin, 2000), hl. 40

⁸² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

- b. Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti, wawancara digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ada.⁸³ Wawancara memiliki arti sebuah cara untuk menghimpun data-data keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden.⁸⁴ Dalam hal ini, wawancara dilakukan baik melalui tatap muka maupun via virtual dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di RA Permata Hati Cilacap, serta kebutuhan penelitian sebagai bahan analisis, wawancara dengan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah, dengan masyarakat/wali murid untuk mengetahui perannya, dengan guru untuk mengetahui kendala maupun keadaan.
- c. Dokumentasi ditujukan agar memperoleh data secara langsung dari lapangan, meliputi buku yang sesuai, peraturan, laporan, foto, film dokumenter, data yang sesuai. Dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah ada dan lalu. Dokumen berupa catatan, gambar, maupun karya momentum, dokumentasi berupa foto-foto penelitian, foto kegiatan, foto program.⁸⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilaksanakan setelah ditemukannya data dari responden atau sumber data lain.⁸⁶ Selain itu analisis data juga memiliki arti proses pencarian data yang dilakukan secara teratur, data yang diperoleh berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam bagian, melakukan sintesis, menyusun ke bagan, memilih yang penting, menyimpulkan.⁸⁷

⁸³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 138.

⁸⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2012), hlm. 82.

⁸⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 219.

⁸⁶ Suharsim Ariokunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cet 3* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 162

⁸⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 335.

Tahap analisis data menggunakan analisis interaktif dengan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Langkah dalam analisis ini adalah: a) reduksi data, b) penyajian data, c) penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif untuk analisisnya bisa dilakukan saat penelitian di lapangan ataupun setelah melakukan penelitian. Pada penelitian ini analisis dilakukan setelah melaksanakan pengumpulan data.⁸⁸

Tahapan analisis data dalam penelitian ini diklasifikasikan dan dijelaskan sebagai berikut:⁸⁹

a. Pengumpulan data

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir. Dalam langkah analisis data ini, penulis merangkum data-data yang sudah dikumpulkan dari observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi mengenai kondisi dan kegiatan. Tujuan dilakukannya *data reduction* adalah untuk memilih data-data pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting hingga menemukan pola.

Teknik ini dilakukan oleh penyusun untuk memilih data dari lapangan yang diperlukan tentang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap. Oleh karena itu, dengan menggunakan reduksi data maka penelitian ini akan lebih fokus pada peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap.

⁸⁸ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 84.

⁸⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

Dalam mereduksi data penelitian, penyusun mengumpulkan data tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap. Data diperoleh berupa catatan observasi, dokumentasi kegiatan, dan hasil wawancara. Kemudian penyusun memilih data yang penting untuk digunakan dalam menyusun hasil penelitian selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bertujuan agar penulis dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Penyajian data digunakan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data berupa Naratif, grafik, matrik, jaringan kerja, dan diagram. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penyajian data berupa teks naratif yang nantinya dapat memudahkan penyusun untuk menceritakan hasil penelitian selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah mereduksi dan menyajikan data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. *Verification* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. *Verification* dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dalam tahap ini penyusun mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis data yang memberikan hasil lebih jelas tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati Cilacap. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan dan menganalisis data mengenai peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati. Penyajian dan analisis data akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati. Hasil analisis akan menggambarkan sejauh mana kesesuaian teori dan praktik dalam proses dan faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati.

A. Gambaran Umum di RA Permata Hati

1. Sejarah Singkat Berdirinya RA Permata Hati

Sejarah berdirinya RA Permata Hati Cilacap ialah lembaga formal yang pada mulanya sebagai sekolah tingkat paling bawah dikarenakan kebutuhan pendidikan tingkat TK/RA. RA Permata Hati Cilacap tersebut bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 10 RT 01/03 Kel. Gunung Simpang, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

Dengan melihat santri TPQ, Madin Baiturroqib yg berlokasi di kompleks Masjid Baiturroqib Jl. Dr. Soetomo No. 10 RT 01 Rw 03 Kel. Gunungsimpang Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah tiap pendaftaran santri baru peserta didiknya meningkatkan dengan usia setara anak PAUD/RA dan pelaksanaan mengaji sore sementara pagi gedung belum dimanfaatkan, sehingga dengan alasan tersebut diatas, Pengurus Yayasan Baiturroqib berinisiatif mengumpulkan pengurus dan toga tomas serta masyarakat sekitar untuk membahas pemanfaatan Gedung dengan mendirikan RA Permata Hati, Alhamdulillah di musyawarah tersebut disepakati berdirinya RA Permata Hati bertepatan, 26 Juni 2011 dengan susunan pengurus pendiri : Penasehat : Drs. Kiswoyo, MM, Ketua : H. Nursaid Harnoto, Sekretaris : Purwanta, Bendahara : H. Sugiyanto, Seksi Pendidikan dan Dakwah :

Drs.Triningsih, Seksi Kurikulum dan Diklat : Meiriyana Hapsari,S.Pd.I,
Seksi Humas dan Dana : Ahmad Sage

Setelah terbentuk Pengurus pendiri, selanjutnya membentuk Bagan organisasi RA Permata Hati ,: Kepala RA : Jauharotunnurul Jannah,S.Pd.AUD, Sekretaris : Riyanti Bendahara : Wiwin Nurdiah,S.Pd

Di awal berdirinya, lembaga ini menjalankan Kurikulum Pemerintah dimana semua siswa yang ada merupakan siswa RA. Sistem seperti ini menjamin bahwa setelah dari jenjang RA maka siswa otomatis masuk mampu bersaing untuk masuk SD Negeri maupun Sekolah favorit lainnya

Secara manajerial terdapat Kepala RA, Secara kepegawaian guru-guru yang bekerja dalam lembaga ini diatur oleh satu sistem sebagai guru RA dan mengajar pada semua kelas di RA. Guru yang mengajar di RA Permata Hati merupakan kebanyakan kalangan lulusan S1. Secara manajerial RA Permata Hati berada di bawah naungan yayasan Baiturroqin Gunungsimping.

Yang melatar belakangi berdirinya RA Permata Hati Cilacap berdiri adalah karena gunungsimping terletak di pinggiran desa yang bisa belajar di TK/RA/Paud sehingga tokoh masyarakat grumbul keser bekerjasama dengan ibu-ibu muslimat tergerak hatinya untuk mendirikan TK/RA, maka berdirilah RA Permata Hati Cilacap.⁹⁰

2. VISI dan Misi dan Tujuan RA Permata Hati Cilacap

VISI RA Permata Hati Cilacap :

Mewujudkan generasi berakhlakul karimah yang unggul dama imtaq dan iptek dan berkreasi

MISI RA Permata Hati Cilacap

- a. Menanamkan nilai nilai Islam dalam pembelajaran
- b. Menyelenggarakan Lingkungan Sekolah yang Sehat
- c. Menyajikan kegiatan pembelajaran Seni dan Ketrampilan

⁹⁰ Dokumentasi di RA Permata Hati Cilacap

- d. Menciptakan suasana Belajar yang nyaman dan menyenangkan
- e. Menanamkan pendidikan Karakter , nasionalisme dan keagamaan
- f. Bekerjasama dengan Pemerintah dalam meningkatkan mutu dan Pembangunan

TUJUAN RA Permata Hati Cilacap

- a. Membantu pelayanan Pendidikan kepada Anak Usia Dini khususnya bagi masyarakat lingkungan RA dan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat luar desa
- b. Membantu melaksanakan pendidikan sejak Dini melalui Bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang berkarakter sehingga bermuara kearah perkembangan sikap perilaku, perasaan, kecerdasan Sosial fisik dan ketrampilan yang di perlukan anak dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan dan Problem Solving
- c. Menjadikan anak sholih, Menjadikan anak sholih, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berkhlahk mulia, Berprestasi ,Kreatif dan Trampil.⁹¹

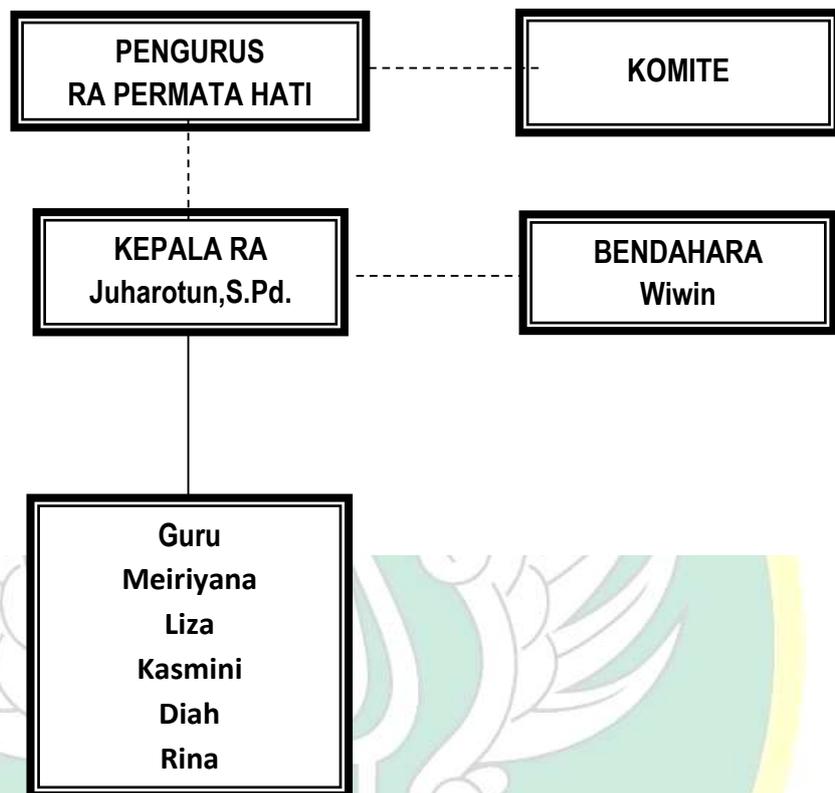
⁹¹ Dokumentasi di RA Permata Hati Cilacap

3. Struktur Kepengurusan RA Permata Hati Cilacap

STRUTUR KEPENGURUSAN

RA Permata Hati Cilacap

TP. 2021/2022



KETERANGAN

- - - - - : Garis Koordinasi

_____ : Garis Komando

Keterangan : Tugas dan wewenang

1. Pengurus RA Permata Hati Cilacap bertanggungjawab dalam:
 - a. Pengembangan Pendidikan di RA Permata Hati Cilacap
 - b. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka optimalisasi Sumber belajar dan sumber dana
 - c. Melengkapi semua kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga
2. Komite RA Permata Hati Cilacap bertugas dalam:
 - a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggara, dan keluaran pendidikan dan di satuan pendidikan.
3. Kepala RA Permata Hati Cilacap bertanggung jawab dalam:
 - a. Pengembangan Program
 - b. Mengkoordinasi guru
 - c. Mengelola administrasi
 - d. Melakukan evaluasi dan Pembinaan terhadap kinerja guru
 - e. Melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran
 - f. Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi guru

- g. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas membina .mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan oleh semua komponen
 - h. Menyusun kurikulum dan mempersiapkan tenaga serta sarana pendidikan dan ketatausahaan
4. Bendahara, mempunyai tugas :
- a. Membantu kepala sekolah menyusun Rencana Anggaran pendapatan dan belanja RaudhotulAthfal (RAPBRA)
 - b. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana dengan perintah dan persetujuan kepala
 - c. Membuat administrasi keuangan, diantaranya buku kas umum
 - d. Mempertanggungjawabkan dana secara administrasi SPJ maupun jumlah uang yang harus tersedia
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala
5. Guru, mempunyai tugas :
- a. Menyusun perangkat rencana pembelajaran
 - b. Mengelola pembelajaran sesuai dengan kelompoknya
 - c. Mencatat perkembangan anak
 - d. Menyusun pelaporan perkembangan anak
 - e. Melakukan kerjasamadengan orang tuadalam program parenting
 - f. Menghadiri pertemuan – pertemuan peningkatan mutu guru (KKG dan IGRA)
 - g. Menyusun pelaksanaan kurikulum⁹²

4. Alamat dan Peta lokasi RA Permata Hati Cilacap

RA Permata Hati Cilacap tersebut bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 10 RT 01/03 Kel. Gunung Simpung, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

5. Status Satuan Lembaga

⁹² Dokumentasi di RA Permata Hati Cilacap

NSM : 101233010117
NPSN : 69884618
Status Akreditasi : B
Nama lembaga : RA Permata Hati Cilacap
Alamat lengkap : Jl. Dr. Soetomo, No. 10
Waktu Belajar : Pagi
NPWP : 02.984.980.9-522.001
Penyelenggara : Baiturroqib Gunungsimping
Status kepemilikan : Milik Yayasan
Tanggal SK : 10 Maret 2014
Status : Swasta
Kurikulum : Kemenag

Roudlotul Athfal (RA) merupakan lembaga formal yang didalamnya ada sebuah hubungan pembelajaran terhadap anak usia empat sampai enam tahun, interaksi tersebut biasanya di legalkan secara resmi oleh pemerintah dengan adanya ijin operasional pendirian lembaga formal yang sah di mata pemerintah RA Permata Hati Cilacap merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah level Madrasah btidaiyah / MI, yang formal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). RA Permata Hati Cilacap berada di daerah Kel. Gunung Sumping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.⁹³

⁹³ Dokumentasi di RA Permata Hati Cilacap

6. Keadaan Pendidik

NO	NAMA PENDIDIK	PENDIDIKAN
1	Jaiharotun Nurul Jannah, S.Pd.AUD	S1
2	Meriana Hapsari, S.Pd.I	S1
3	Wiwin Nurdiah, S.Pd.	S1
4	Riyanti	SMK
5	Liza Fariawati, S.T	S1
6	Kasmini, S.Pd.	S1
7	Diah AK, S.Pd.	S1
8	Rina DS	SMK

7. Keadaan Peserta Didik

Jumlah Siswa	A1		A2		B1		B2	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
	7	9	10	17	10	15	10	14

8. Sarana dan Prasarana

Sarana yang di miliki oleh RA Permata Hati Cilacap sebagai berikut:

1. Ruang Kepala : 1
2. Ruang Guru : 1
3. Gudang : 1
4. Ruang Kelas : 4
5. WC Guru : 1
6. WC Siswa : 1

9. Biaya Pendidikan

Sumber biaya pendidikan di RA Permata Hati Cilacap Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Rincian Biaya	Nominal	Keterangan
1	SPP	Rp. 70.000	Per Bulan
2	Pendaftaran	Rp. 0	Gratis
3	Infak	Rp. 100.000	Per Tahun
6	Ujian	Rp. 750.000	Per Tahun

B. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati

Penyajian deskripsi hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Ketiga, partisipasi dalam evaluasi.

Adapun berkaitan dengan tahapan dalam pembiayaan pendidikan, Mulyasa menyebutkan bahwa tahapan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi di mana hal-hal tersebut saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Kedua teori tersebut, baik teori yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff tentang pengelompokan partisipasi masyarakat dan teori yang disampaikan oleh Mulyasa tentang tahapan dalam pembiayaan pendidikan keduanya memiliki keselarasan, yakni partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk itu, ketiga tahapan dalam pembiayaan pendidikan tersebut, yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati akan digunakan sebagai alur pada penyajian deskripsi hasil temuan penelitian ini.

Dari hasil wawancara dengan Wiwin Nurdiah selaku bendahara RA Permata Hati⁹⁴ diperoleh informasi bahwa secara umum pembiayaan yang ada di RA Permata Hati meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, pembiayaan operasional RA Permata Hati yang terdiri dari pembayaran gaji atau bisyārah guru serta pendamping serta pembiayaan bagi kebutuhan pembelajaran, seperti fotokopi materi, pembelian ATK, dan sebagainya. Kedua, pembiayaan bagi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran di mana dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembiayaan pembangunan gedung RA Permata Hati. Ketiga, pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya terprogram dan partisipatif. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan terprogram adalah kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara rutin dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan haflah ākhir as-sanah RA Permata Hati. Kemudian, kegiatan partisipatif yang ada di RA Permata Hati, yakni keikutsertaan RA Permata Hati dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada keikutsertaan RA Permata Hati dalam pawai ta'aruf yang diadakan secara rutin tiap tahunnya.

Dalam fokus penelitian ini, jenis pembiayaan yang akan dikaji ialah capital cost dan recurrent cost. Kedua jenis pembiayaan tersebut jika ditarik ke dalam kondisi yang ada di RA Permata Hati, maka akan diperoleh adanya kesesuaian, yakni pembiayaan pembangunan gedung RA Permata Hati yang masuk dalam kategori capital cost dan pembiayaan bagi kebutuhan operasional RA Permata Hati (pembayaran bisyārah guru serta pendamping serta pembiayaan bagi kebutuhan pembelajaran RA) yang masuk dalam kategori recurrent cost serta terdapat satu pembiayaan lagi yakni bagi kegiatan partisipatif dan terprogram di mana hal tersebut juga turut dikaji dalam penelitian ini. Berikut deskripsi hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam

⁹⁴Hasil wawancara dengan Wiwin Nurdiah selaku bendahara RA pada tanggal 20 Mei 2022.

pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di RA Permata Hati, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Operasional RA Permata Hati.

Dalam pelaksanaan pembiayaan operasional RA Permata Hati, sebagaimana dalam perencanaannya juga terbagi ke dalam dua hal, yakni pelaksanaan pembayaran bisyārah guru serta pendamping serta penggunaan ataupun pembelanjaan infak siswa. Pertama, pembayaran bisyārah guru serta pendamping. Adapun mekanisme pembayaran bisyārah guru serta pendamping ialah diawali dari penarikan SPP para siswa.

Dari hasil wawancara dengan Bu Riyani⁹⁵ tentang mekanisme penarikan SPP para siswa, beliau menyampaikan: Tiap siswa kami bagikan kartu SPP tiap bulannya sebelum tanggal tiga. Kemudian kartu SPP tersebut oleh para siswa disampaikan kepada orang tua masing-masing untuk diisi dan dibawa oleh wali siswa atau orang tua pada pertemuan wali siswa pada tanggal empat tiap bulannya. Pada pertemuan wali siswa inilah kami mengumpulkan dana dari para wali siswa di mana dana tersebut memang khusus dan hanya digunakan untuk membiayai atau membayar bisyārah guru tiap bulannya termasuk kepada para pendamping dengan besaran SPP Rp 15.000 tiap siswa. Dalam wawancara yang sama, Guru Roso menerangkan bahwa dengan nominal SPP Rp 15.000 tiap bulannya yang harus dibayarkan oleh para siswa, terdapat beberapa siswa yang membayar SPP secara rutin tiap bulannya di atas nominal Rp 15.000. Ada yang membayar Rp 20.000 tiap bulannya. Ada pula yang membayar Rp 25.000 tiap bulannya, bahkan ada yang sampai membayar Rp 50.000 tiap bulannya. Hal itu semakin memperkuat keuangan RA Permata Hati, khususnya bagi pembayaran bisyārah guru serta pendamping pada tiap bulannya. Selain dengan para wali siswa yang membayar SPP di atas nominal sesuai kesepakatan (Rp 15.000), ada pula wali siswa yang membayar SPP tidak secara rutin.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

Berikut penjelasan Bu Riyani⁹⁶ mengenai hal tersebut: Ada wali siswa yang tidak membayar SPP secara rutin di mana hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang memang tidak memungkinkan, seperti satu tahun hanya membayar tiga atau empat bulan saja atau bahkan satu bulan saja. Tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah besar bagi kami karena masih ada wali siswa lain yang membayar lebih dan hal tersebut bisa digunakan untuk subsidi silang dan wali siswa yang membayar lebih pun kami sampaikan tentang hal tersebut dan meminta keikhlasan yang bersangkutan. Hal yang terpenting bagi kami adalah anak-anak mau mengaji. Masih dalam wawancara yang sama, Bu Riyani⁹⁷ menyampaikan bahwa para guru pun memiliki peran dalam pengelolaan SPP siswa ini, yakni dengan mengingatkan wali siswa melalui putra-putri mereka agar melakukan pembayaran SPP pada saat pertemuan wali siswa dan ketika wali siswa berhalangan hadir, maka SPP bisa dibayarkan melalui para siswa setelah hari atau tanggal pertemuan wali siswa, yakni pada tanggal empat tiap bulannya.

Adapun kaitannya dengan sumber pembiayaan bisyārah guru serta pendamping ini, selain wali siswa sebagai sumber pembiayaan utama, berdasarkan penjelasan Bu Riyani⁹⁸ beliau menyampaikan bahwa khusus pembiayaan bagi bisyārah guru serta pendamping ini terdapat sumber pembiayaan lain selain dari wali siswa, yaitu dari pengurus RA Permata Hati.

Para pengurus RA Permata Hati pada setiap bulannya menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki untuk membantu memenuhi pembiayaan bisyārah guru serta pendamping, namun dengan nominal yang tidak ditentukan sesuai dengan kerelaan masing-masing. Hal tersebut tentunya memperkuat ketersediaan biaya pada tiap bulannya bagi pembayaran bisyārah guru serta pendamping. Selain itu, terdapat pula warga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan RA Permata Hati, namun ia turut membantu ataupun sebagai donatur bagi pembayaran bisyārah guru serta pendamping.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

Selanjutnya, mekanisme pembayaran SPP oleh wali siswa kepada pihak RA saat pertemuan wali siswa pada tanggal empat tiap bulannya, Bu Riyani⁹⁹ menerangkan bahwa pembayaran SPP saat pertemuan wali siswa dilaksanakan setelah rangkaian acara pertemuan tersebut selesai, tepatnya setelah penutupan dan dilanjutkan dengan berjabat tangan antara pengurus, guru, pendamping, dan wali siswa. Setelah proses jabat tangan selesai, tiap wali kelas (guru) dengan didampingi oleh pendamping menempati posisinya masing-masing di meja yang telah disiapkan, lalu para wali siswa berkumpul atau mendekat sesuai dengan wali kelas putra-putri mereka masing-masing dan pada saat itulah para wali siswa menyampaikan pembayaran SPP bagi putra-putri mereka dengan menyerahkan kartu SPP yang telah diberikan pihak RA melalui putra-putri mereka sebelumnya.

Bu Riyani¹⁰⁰ juga menambahkan bahwa pertemuan wali siswa merupakan kesempatan bagi pihak RA Permata Hati untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan RA khususnya bagi pembayaran bisyārah guru serta pendamping. Selain itu, pertemuan tersebut juga digunakan sebagai wadah untuk mendengarkan masukan, saran, kritikan, bahkan evaluasi ataupun harapan dari wali siswa kepada RA Permata Hati.

Dari keterangan Bu Riyani¹⁰¹ dalam wawancara yang sama, perlu diketahui pula bahwa tiap wali kelas memiliki catatan keuangan kelas/ SPP masing-masing. Pada saat para wali siswa membayar SPP, wali kelas mencatat penerimaan uang SPP tersebut pada catatan masing-masing. Kemudian, catatan tersebut beserta uang yang telah terkumpul diserahkan kepada bendahara. Kemudian, koordinator guru pun merekap penerimaan SPP dari masing-masing kelas untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara RA Permata Hati (Darni Kartiono).

Lalu, bendahara RA Permata Hati mencatat pemasukan tersebut beserta uang SPP dan uang tersebut dikelola untuk pembayaran bisyārah guru serta

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

pendamping. Pada saat guru serta pendamping menerima bisyārah, bendahara RA meminta kepada masing-masing dari mereka untuk membubuhkan tanda tangan pada lembar penerimaan bisyārah sebagai bukti telah menerima bisyārah dan antara guru yang satu dengan yang lain pun saling mengetahui besaran atau jumlah bisyārah yang diterimakan termasuk pendamping sehingga diharapkan tercipta keterbukaan di antara sesama.

Hal tersebut juga digunakan sebagai catatan atau laporan pembayaran bisyārah guru serta pendamping dari RA Permata Hati kepada wali siswa. Berikut penjelasan Bu Riyani¹⁰² terkait pencatatan pemasukan RA Permata Hati khususnya dalam hal SPP siswa dan bisyārah guru serta pendamping: Semua pemasukan dan pengeluaran RA, kami catat dengan sebaik mungkin semampu kami. Termasuk pemasukan dari selain wali siswa pun kami catat, baik dari ibu-ibu pengurus RW maupun masyarakat bahkan ada donatur tetap bagi RA Permata Hati untuk pembayaran bisyārah para guru, yakni Ibu Eko di mana tiap bulannya ia selalu memberikan bantuan untuk membantu pembayaran bisyārah guru serta pendamping RA sebesar Rp 100.000. Kemudian, uang tersebut beserta catatannya disampaikan kepada bendahara RA saat pertemuan pengurus dan guru serta pendamping. Oleh bendahara RA, uang tersebut dikelola lebih lanjut untuk melengkapi pembayaran bisyārah guru serta pendamping.

Adapun berkaitan dengan nominal bisyārah yang diterimakan oleh guru serta pendamping, dari hasil penjelasan wiwin selaku bendahara RA Permata Hati 103 diperoleh informasi bahwa tiap bulannya masing-masing guru mendapatkan bisyārah sebesar Rp 250.000 dan pendamping Rp 200.000. Pada saat penulis menanyakan kepada Riyani tentang alasan pemberian bisyārah dengan jumlah atau nominal yang berbeda kepada guru, pendamping, beliau menjelaskan bahwa masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga setidaknya hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pemberian besaran bisyārah.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Riyani selaku guru RA pada tanggal 22 Mei 2022

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Wiwin selaku bendahara pada tanggal 20 Mei 2022

Seperti tokoh masyarakat, penasihat, dan guru di RA Permata Hati tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sehingga perlu diberi bisyārah yang memang lebih dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula antara guru dengan pendamping di mana para guru selain membimbing secara langsung satu per satu kepada para siswa (privat), mereka juga harus mengajar atau memberikan materi secara klasikal kepada para siswa. Adapun pendamping bertugas untuk mendampingi dan membantu para guru dalam mengajar, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kelas termasuk pencatatan SPP siswa dan mengondisikan siswa supaya dapat kondusif dalam pembelajaran. Adapun pendamping di sini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar RA Permata Hati yang meluangkan waktunya pada sore hari dan mau untuk ikut serta secara langsung dalam kegiatan RA Permata Hati.

Beberapa alasan tersebutlah yang menjadi pertimbangan pengurus dalam menentukan besaran bisyārah yang diterimakan guru serta pendamping. Kedua, infak siswa. Pelaksanaan pembiayaan operasional RA Permata Hati yang kedua adalah pembelian ATK dan sejenisnya melalui infak siswa. Dari hasil wawancara dengan Bu Kasmini¹⁰⁴ berkaitan dengan pengelolaan infak siswa, beliau menyampaikan bahwa pengelolaan infak siswa dilakukan oleh guru atau wali kelas masing-masing. Tiap wali kelas atau guru berkewajiban menerima ataupun menarik uang infak tersebut dari para siswa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yakni dilaksanakan setiap hari Kamis dengan nominal Rp 500 bagi tiap siswa. Setelah itu, wali kelas berkewajiban untuk melakukan pencatatan terhadap uang infak siswa tersebut, baik pemasukan maupun pengeluaran uang infak untuk selanjutnya catatan atau laporan tersebut disampaikan kepada wali siswa pada saat pertemuan rutin pada tanggal empat tiap bulannya, sehingga wali siswa mengetahui berapa jumlah uang infak yang masuk dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Itu semua menjadi kewajiban masing-masing wali kelas dalam pengelolaannya.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kasmini selaku guru RA pada tanggal 21 Mei 2022

Penggunaan uang infak tersebut berdasarkan penjelasan Bu Kasmini¹⁰⁵ dalam wawancara yang sama disampaikan bahwa penggunaan uang infak siswa tidaklah diputuskan secara sepihak oleh guru ataupun pengurus, namun melalui musyawarah sebagaimana saat usulan adanya infak siswa tersebut muncul. Dalam musyawarah antara wali siswa dengan pengurus serta guru tersebut, selain menentukan nominal infak yakni Rp 1000 tiap siswa, juga dibahas terkait teknis pelaksanaannya, siapa yang mengelola, hingga penggunaannya. Wali siswa menginginkan infak tersebut dapat kembali lagi untuk kepentingan siswa. Akhirnya, berdasarkan musyawarah saat itu ditetapkan bahwa uang infak siswa tersebut dikelola oleh wali kelas masing-masing untuk kepentingan kelas masing-masing, khususnya untuk kepentingan pembelajaran siswa, seperti fotokopi materi, pembelian ATK untuk pembelajaran, dan sebagainya.

Termasuk jika dana yang ada memungkinkan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terduga, seperti menjenguk siswa lain yang sedang terkena musibah, seperti sakit dan sebagainya. Pada saat penulis menanyakan keterlibatan wali siswa dalam infak tersebut melalui para siswa, Bu Kasmini¹⁰⁶ menjelaskan: Sebagian besar siswa memberikan infak, namun ada juga yang tidak karena memang saat itu mereka tidak membawa uang. Bagi kami hal tersebut tidak apa-apa yang penting mereka mau mengaji dan ketika siswa yang saat itu tidak berinfak, bukan berarti selamanya tidak mau berinfak. Ketika santri tersebut mempunyai uang, ia pun mau berinfak.

Adapun terkait teknis pelaksanaan infak siswa tersebut, masih dalam wawancara yang sama Bu Kasmini¹⁰⁷ menceritakan bahwa hal tersebut merupakan otonomi masing-masing kelas. Setiap kelas memiliki caranya masing-masing dan hal tersebut tergantung wali kelas. Ada kelas yang melaksanakan penarikan infak pada awal pembelajaran sebelum para santri menggunakan uangnya untuk membeli makanan, yakni dengan cara para siswa menyisihkan uang mereka untuk berinfak dengan dimasukkan ke wadah yang

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kasmini selaku guru RA pada tanggal 21 Mei 2022

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kasmini selaku guru RA pada tanggal 21 Mei 2022

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Kasmini selaku guru RA pada tanggal 21 Mei 2022

telah disiapkan, seperti dalam bentuk kaleng infak. Ada pula wali kelas yang melaksanakan penarikan infak siswa tersebut di akhir pembelajaran saat mereka akan pulang sambil berbaris untuk bersalaman, mereka memasukan uang tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan.

Setelah semua uang infak terkumpul, masing-masing wali kelas menghitung uang tersebut dan dicatat pada lembar infak yang dimiliki masing-masing wali kelas. Setiap pemasukan dan pengeluaran uang infak tersebut wajib dicatat oleh tiap wali kelas untuk dilaporkan kepada pengurus pada saat pertemuan pengurus dan guru pada tanggal tiga tiap bulannya serta catatan infak tersebut juga dilaporkan kepada wali santri pada pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya.

1. Bidang Membangun Jaringan

Kemitraan secara umum akan terjalin bilamana terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi focus of interest satu pihak saja. Dengan kata lain bahwa kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mencita-citakan adanya percepatan progres pembangunan. Kemitraan merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait dengan barang publik (public goods) misalnya dalam hal pemeliharaan dan pelestarian lingkungan seperti program menabung pohon dimana baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kepentingan dengan keberadaannya. Masyarakat sekitar lahan yang ditanami pohon baik secara ekonomi maupun sosial sangat berharap banyak terhadap pohon yang ditanam. Sementara, disisi yang lain pemerintah memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap penanaman kembali lahan kritis, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi ekologi.

Pihak sekolah hendaknya memperhatikan peran masyarakat yang sudah ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan dengan cara menggalang dan mendorong untuk lebih aktif dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Selama ini sekolah terkesan niemperlakukan masyarakat hanya sebagai pelengkap, sehingga terbentuk opini bahwa sekolah merupakan

tanggung jawab pemerintah saja. Untuk lebih menarik keterlibatan masyarakat perlu membuat aktivitas-aktivitas yang diharapkan mampu membangkitkan partisipasi aktif warga masyarakat, dalam ikut memajukan sekolah yang dikoordinasi komite sekolah.¹⁰⁸

Adapun strategi dari sekolah untuk mengatasi masalah dana adalah memperbanyak relasi donatur. sekolah juga memiliki program donatur dua puluh ribu perbulan untuk bisa menyentuh seluruh kalangan agar bisa menjadi donatur tetap di sekolah ini. Program seperti ini sangat efektif, karena dari dana tersebut sudah bisa menutupi beberapa program yang ada di sekolah dan semakin banyak donatur semakin banyak orang yang percaya terhadap perkembangan sekolah ke depan. Biasanya yang mengurus itu adalah bendahara sekolah disetujui oleh kepala Sekolah dan dilaporkan kepada yayasan dan komite sekolah dan pemerintah. Untuk dana dari yayasan, sekolah juga membuat surat permohonan dana. Kelebihan dana di sekolah ini tidak pernah, karena dana dari yayasan langsung berdasarkan apa yang sekolah butuhkan. Kalau kekurangan dana, dari yayasan menambahkan. Ada prosedur untuk pengajuan dana ke yayasan, seperti bagian sarana prasarana. Penanggung jawab utama kepada pihak yayasan. Kepala Sekolah melakukan pemantauan langsung

Dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sinergi antar elemen menjadi kunci dalam memainkan perannya masing-masing. Bangunan kemitraan harus didasarkan padahal berikut: kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan kesediaan untukberkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau equality, keterbukaan atau transparency dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Sejatinnya membangun kemitraan sangatlah penting untuk membuka akses menuju kemandirian masyarakat

¹⁰⁸ Wawancara dengan kepala sekolah Ra Permata Hati Cilacap. Senin, 30 Mei 2022

terutama dalam memasarkan hasil produksinya atau bermitra dalam program menabung pohon . Disamping itu, membangun kemitraan merupakan salah satu mata tugas dari seorang Fasilitator program menabung pohon selain komunikasi dialogis dan mengorganisasikan masyarakat. Ada 8 membangun jaringan di RA Permata Hati yaitu :¹⁰⁹

- a. membangun kepercayaan
- b. membangun jaringan bisnis yang saling menguntungkan
- c. memperbanyak kenalan
- d. bergabung dalam forum atau Komunitas Pengusaha
- e. bersikap ramah dan memberi dukungan pada rekan
- f. memiliki komitmen dan tanggung jawab
- g. Saling menghargai
- h. menjaga komunikasi yang baik dan mengambil sisi positif

2. Bidang Usaha

Modal sosial mungkin belum banyak disebutkan selama ini, kita lebih banyak berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan unsur SDM, unsur fisik, unsur SDA, dan unsur finansial. Modal sosial sebenarnya bukanlah hal yang baru khususnya dari perspektif sosiologi. Modal sosial adalah suatu perangkat sosial yang dapat mendorong berlanjutnya suatu kehidupan bermasyarakat dengan tatanan yang jauh lebih sejahtera dan tentu tidak memiskinkan. Jadi modal sosial merupakan jejaring sosial yang memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dari suatu masyarakat yang berupa norma timbul balik satu dengan yang lain.

Modal sosial dapat ditilik dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah nilai, kedua yaitu institusi dan ketiga ialah mekanisme. Pada tingkatan nilai, sebuah jaringan bisa terbentuk karena latar belakang kepercayaan terhadap nilai yang sama, misal agama, politik, keturunan, dan lain-lain. Pada level kedua, yakni institusi, dimana jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi, dimana terdapat pula perlakuan

¹⁰⁹ Wawancara dengan kepala sekolah Ra Permata Hati Cilacap. Senin, 30 Mei 2022

khusus terhadap individu-individu yang berada pada jaringan nilai sama untuk memperoleh modal sosial dari jaringan tersebut. Selanjutnya merupakan tingkatan mekanisme, dimana modal sosial yang telah terbentuk pada tingkatan pertama dan kedua mulai mengambil bentuk kerjasama. Kontribusi modal sosial juga terdiri dari tiga jenjang. Jenjang pertama adalah individu, yakni memberikan dukungan sebagai alat pendekatan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan dukungan serta pendampingan. Jenjang kedua yaitu komunitas, modal sosial pada level ini memberi kontribusi pada promosi pengembangan institusi lokal yang ada di daerah, jaringan kerjasama antar komunitas dan pengembangan informasi bersama komunitas. Terakhir yaitu tingkat nasional, modal sosial memberikan sumbangan dalam wujud pengembangan kebijakan yang partisipatif dan pengembangan jaringan pelayanan masyarakat.¹¹⁰

Wujud nyata ketiga tipe modal sosial antara lain 1) hubungan sosial, 2) adat dan nilai budaya lokal, 3) toleransi, 4) kesediaan untuk mendengar, 5) kejujuran, 6) kearifan lokal dan pengetahuan lokal, 7) jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, 8) kepercayaan, 9) kebersamaan dan kesetiaan, 10) tanggungjawab sosial, 11) partisipasi masyarakat, 12) kemandirian. Berdasarkan pada paparan di atas, di RA Permata Hati Cilacap pada saat ini membuka usaha yang berhubungan dengan pendidikan karena minat belajar atau sekolah di usia dini sangat tinggi sehingga membuka usaha misalnya Private mengaji, penitipan anak, warung kuliner dan lain-lain.¹¹¹

3. Bidang Koperasi

Dalam sejarah, diberbagai Negara telah mencoba untuk membangun system ekonomi koperasi ini menyusul Negara Inggris sebagai pendahulu, mulai dari Perancis, Jerman dan diikuti oleh Negara-negara lain. Tidak ketinggalan pula Indonesia mencoba memperbaiki ekonomi dengan mengembangkan system ekonomi koperasi di bumi Indonesia tercinta ini.

¹¹⁰ Wawancara dengan kepala sekolah Ra Permata Hati Cilacap. Senin, 30 Mei 2022

¹¹¹ Wawancara dengan kepala sekolah Ra Permata Hati Cilacap. Senin, 30 Mei 2022

Namun seperti yang kita lihat sekarang system ekonomi yang diterapkan belum cukup menangani kebobrokan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita perlu menelaah kembali sejarah perkembangan ekonomi Indonesia untuk sedikit menyadarkan bahwa sesungguhnya system ekonomi koperasi tidak kalah dengan system ekonomi yang lain dan bahkan lebih baik dari system-system yang ada di Indonesia saat ini.

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar - benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

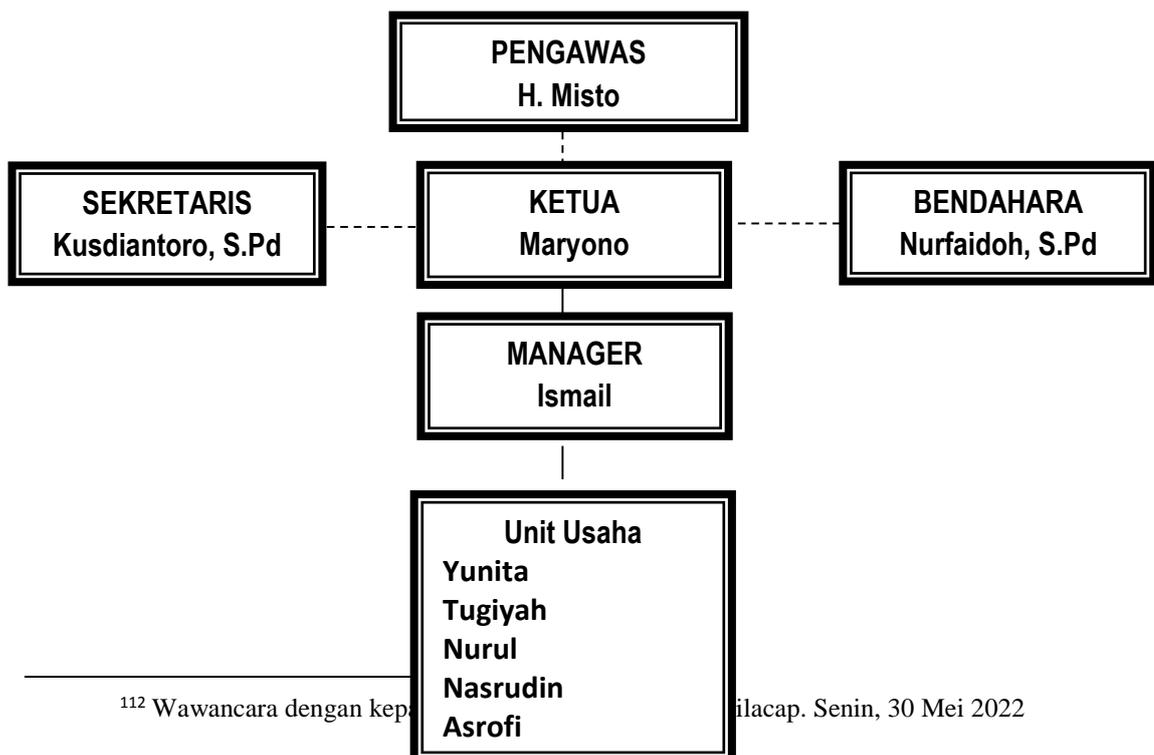
Sehubungan dengan itu, peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama - sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Koperasi merupakan saka guru perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi sangat penting, koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya bagi para anggotanya. Menyadari betapa pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, mari kita menggalakkan kembali perkoperasian demi kemajuan dan kemakmuran bangsa ini di masa mendatang

Modal sosial hanyalah salah satu diantara modal lainnya yang mendukung pendanaan pendidikan pada level makro maupun mikro. Pemberdayaan modal sosial bukan dimaknai sebagai aksi mengeksploitasi

masyarakat sebagai sumber dana sekolah, namun lebih kepada bagaimana sekolah bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola modal sosial yang ada pada masyarakat/stakeholders. Diperlukan kesediaan dan kemampuan yang baik dari pihak pimpinan sekolah untuk melibatkan unsur di luar masyarakat bukan hanya sebagai kontributor dana, melainkan juga perencana jalannya pembiayaan pendidikan. Perlu pula ditumbuhkannya optimisme pada pihak sekolah bahwa modal sosial yang ada itu melimpah, namun untuk efektivitas termanfaatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu yang memerlukan tidak hanya keterampilan teknis namun juga keterampilan sosial.

Sedangkan koperasi yang dilakukan oleh RA Permata Hati Cilacap adalah koperasi konsumen Koperasi ini ditujukan pada konsumen barang dan jasa seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya yakni dewan guru, wali murid dan masyarakat.¹¹²

STRUTUR KEPENGURUSAN
Koperasi Rizki Berkah
TP. 2021/2022



¹¹² Wawancara dengan kep

ilacap. Senin, 30 Mei 2022

4. Bidang Finansial

Perencanaan pembiayaan di sekolah ini berawal dari merencanakan anggaran sekolah sesuai kebutuhannya selama satu tahun mendatang yang kemudian akan disusun di RAPBS oleh bendahara dan kepala sekolah. Sumber-sumber dana di sekolah ini yaitu berasal dari dana pemerintah (BOS), dana yayasan, dan dana donatur. Keseluruhan dana dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 8 standar pendidikan di sekolah ini di mana prioritas utamanya adalah kesejahteraan guru

Pembiayaan pendidikan tidak hanya perihal analisis sumber-sumber dana, melainkan penggunaan dana secara efisien. Dengan kata lain lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Melihat bahwa pendidikan melibatkan banyak orang dan uang, baik dalam jumlah siswa maupun tenaga kerja yang terlibat, demikian juga dilihat dari jumlah anggarannya. Seperti halnya pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah, proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan perlu didukung biaya yang memadai sehingga menjamin kelancaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karenanya perlu ada upaya untuk mengelola pembiayaan pendidikan yang baik secara efisien dan efektif demi memenuhi kebutuhan pendidikan yang berlangsung di sekolah sehingga tujuan dari sekolah tersebut dapat tercapai.¹¹³

Kemudian masalah yang kerap kali muncul dalam pembiayaan, seperti terjadinya defisit dikarenakan pemasukan dana di sekolah ini tidak dapat menjawab kebutuhan sekolah. Sekolah juga pada awalnya telah menggratiskan biaya masuk bagi peserta didiknya, sehingga pemasukan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Wiwin selaku bendahara pada tanggal 20 Mei 2022

dana untuk sekolah tidak dari biaya pendidikan peserta didik. Upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi masalah ini yaitu dengan sokongan dana dari pengurus yayasan. Dana ini sifatnya dana pribadi dari masing-masing pengurus yayasan dan dana usaha dari menjual air minum isi ulang. Sekolah ini mempunyai strategi untuk menambah pemasukan dana sekolah yaitu dengan donatur dua puluh ribu. Jelasnya setiap masyarakat dapat menjadi donatur tetap di sekolah dengan hanya menyumbangkan uang sejumlah dua puluh ribu setiap bulannya. Dana yang terkumpul akan dicatat oleh bendahara sekolah dan diunggah pada website sekolah. Hal itu memudahkan pula masyarakat umum dalam mengetahui bagaimana cara untuk menjadi donatur di sekolah ini, dan memudahkan para donatur untuk mengetahui laporan program yang dijalankan oleh sekolah langsung. Kemudian disusun berdasarkan format yang ada. Lalu setelah bendahara membuat laporan kepala sekolah mengecek kembali laporan tersebut.

Untuk mengurangi dampak dan mencegah kendala yang dialami sekolah, cara yang ditempuh adalah meminimalisir kebutuhan di sekolah terlebih dahulu. Memprioritaskan apa yang lebih didahulukan. Terutama gaji guru dan kegiatan belajar. Pihak yayasan juga membantu menyokong dana kepada sekolah dengan dana personal setiap pengurusnya untuk menutupi defisit dana yang dialami sekolah. Strategi yang lain juga dengan cara mengajak secara masif donator baru dengan cara donatur dua puluh ribu. Secara ringkas bahwa strategi ini adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat umum yang ingin menjadi donatur tetap sekolah dengan hanya menyumbang dana dua puluh ribu setiap bulannya.¹¹⁴

Pelaporan keuangan di sekolah dikerjakan oleh bendahara dengan mengumpulkan kwintansi-kwitansi dari tiap guru dari pembelajaran mereka selama pelaksanaan. Semua kwitansi akan dicatat dalam laporan keuangan setiap tiga bulan. Laporan pertanggungjawaban dana BOS akan diberikan kepada pemerintah, laporan keuangan yang lain akan diserahkan kepada

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Wiwin selaku bendahara pada tanggal 20 Mei 2022

yayasan dan para donatur, serta akan menjadi arsip di sekolah sebagai pemenuhan standar pembiayaan sekolah. Dalam proses penyusunan laporan keuangannya, Kepala Sekolah umumnya terlebih dahulu kepada guru-guru yang mempunyai bon atau nota pembayaran, lalu dikumpulkan kepada bendahara dan diberitahukan terkait keperluan tersebut. Lalu bendahara menyusun pengeluaran yang sudah dicatat berdasarkan bon yang ada di guru maupun program.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya pelaksanaan finansial yang baik antara lain yaitu untuk membantu pengelolaan keuangan yang baik dari seluruh sumber daya yang diperoleh sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan finansial yang disediakan. Disiplin finansial juga membantu disiplin sosial secara optimal dalam mengupayakan kondisi finansial yang harus sesuai kebutuhan. Maka dari itu finansial di RA Permata Hati selaku mengedepankan profesional akuntabel dan transparansi demi terjalinnya komunikasi dan kepercayaan masyarakat.¹¹⁵

Daftar Donatur RA Permata Hati Cilacap

No.	NAMA	JUMLAH
1	Ibu Hj. Sumarsih	
2	Ibu Tuti	
3	Bpk Muahir	
4	BPpk H. Marsono	
5	Bpk joko prasetyo	
6	Slamet Wahyono	
7	Bpk Wahyu	
8	Ibu Sumardi	
9	Bpk Sarjum	
10	Ibu Kasbun	
11	Ibu Isnaini	
12	Ibu Hj. Sulistio	
13	Bpk Hodirun	
14	Bpk Ponardi	
15	H.Nursaid	
16	Bpk Eko widianto	
17	H.marjalan	
18	Ibu Dasikem	
19	Bpk Sirun	

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Wiwin selaku bendahara pada tanggal 20 Mei 2022

20	H.Diyati	
21	H.misto	
22	Nurwiyanto	
23	Sarino	
24	Wongso giyoto	
25	Bustomi	
26	Muhyi	
27	Muskirah	

C. Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati yang meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati:

Untuk mengawali pembahasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati, Cohen dan Uphoff mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program dalam hal ini pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Adapun ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program menurut Cohen dan Uphoff meliputi: Pertama, penggerakan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi. Ketiga, penjabaran program.

Masyarakat mempunyai masalah yang kompleks, untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya dengan pendidikan. Menurut Tilaar; Fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Pendidikan merupakan karya manusia yang sangat kompleks, berdimensi banyak yang dimulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara, Semuan dimensi tersebut mempunyai saham dalam penentuan dan pengembangan dimensi-dimensi tertentu dalam pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi (berperan sera) dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan

kemampuan masyarakat baik dalam wawasan kependidikan maupun meningkatkan kemampuan kinerjanya. Karenanya dalam rangka peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan merata perlu adanya upaya peningkatan, baik dalam hal wawasan maupun kesadaran untuk terlibat aktif. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tetapi juga melekat kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam usaha-usaha menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyusunan program kerja sekolah termasuk dalam implementasinya. Hal ini memiliki relevansi dengan penjabaran operasional Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Upaya menumbuhkan prakarsa dan peranserta masyarakat yang berkaitan dengan keputusan pengelolaan pendidikan hendaknya diambil dan bertumpu pada sekolah serta masyarakat. Usaha ini diharapkan mampu mendorong kemajuan sekolah tanpa meninggalkan nilai-nilai setempat dengan memperluas basis mitra sekolah.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut di atas hendaknya dibuat program tersendiri tetapi pelaksanaan dapat terpisah atau terintegrasi ke dalam program sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan upaya peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan diadakan suatu evaluasi yang komprehensif dan dilakukan oleh evaluator yang obyektif. Hal ini dipersyaratkan supaya hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai dasar pijakan berikutnya. Evaluator harus memahami pokok permasalahan dan dapat memperoleh informasi yang relevan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan perlu dikelola dengan manajemen yang baik, karena manajemen merupakan suatu proses yang berupaya mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak perlu menjadi sistem total untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan manajemen tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.

Komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup dengan informasi verbal saja, tetapi informasinya harus dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditujukan kepada masyarakat, agar tumbuh citra positif tentang pendidikan di kalangan masyarakat. Masyarakat pada umumnya memang ingin bukti nyata sebelum mereka memberi dukungan terhadap sesuatu, oleh sebab itu hal ini perlu di usahakan sekolah, misalnya dengan mengadakan pameran pendidikan

Dari data yang diperoleh terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi bukti kesesuaian tersebut. Pertama, adanya penggerakan sumber daya dan dana. Kedua hal ini terlihat jelas dalam berbagai program atau jenis pembiayaan pendidikan yang ada di RA Permata Hati. Pada pelaksanaan pembiayaan bisyarah guru serta pendamping, pengurus dan guru serta pendamping RA Permata Hati berupaya menarik dana yang ada di masyarakat khususnya para wali siswa dalam acara pertemuan wali siswa yang diadakan secara rutin pada tanggal empat tiap bulannya. Para wali siswa diberi undangan yang dititipkan kepada putra-putri mereka saat mengaji sekaligus memberikan kartu SPP untuk dibawa pada saat pertemuan wali siswa.

Adapun pembayaran SPP siswa dilaksanakan pada akhir pertemuan di mana saat itu tiap wali siswa berkumpul bersama wali kelas putra-putri mereka untuk melakukan pembayaran SPP, yakni dengan membawa kartu SPP yang telah dititipkan kepada putra-putri mereka sebelum pelaksanaan pertemuan tersebut. Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut wali siswa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atau saran bahkan kritik terhadap RA atau sekedar menanyakan perkembangan putra-putri mereka. Pola pembayaran SPP tersebut nampaknya dapat menjadi alternatif bagi lembaga pendidikan lain khususnya RA dalam mengumpulkan dana dari para wali siswa. Kecenderungan dan hal yang lazim dilaksanakan ialah lembaga-lembaga pendidikan khususnya RA yang menerapkan pembayaran SPP bagi para siswanya sebatas memberikan kartu SPP untuk diserahkan kepada wali

masing-masing dan kemudian kartu tersebut diisi oleh wali siswa dan dibawa kembali oleh siswa untuk diserahkan kepada guru.

Kelemahan dari pola tersebut di antaranya ialah keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat khususnya wali siswa dalam pembayaran SPP cenderung kurang aktif. Namun dengan pola pembayaran SPP yang dilakukan pada saat pertemuan wali siswa, pemasukan SPP siswa cenderung stabil karena banyak wali siswa yang membayarkan SPP pada saat itu. Dengan pola tersebut akan terjalin komunikasi antara pihak RA Permata Hati dengan wali siswa di mana dampaknya ialah pihak RA dapat mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan para wali siswa dan wali siswa pun dapat mengetahui perkembangan kondisi putra atau putri mereka secara langsung dari penjelasan guru. Hal tersebut setidaknya dapat menunjukkan adanya penggerakan yang dilakukan oleh pihak RA Permata Hati kepada masyarakat khususnya wali siswa, baik dalam bentuk sumber daya maupun sumber dana. Penggerakan sumber daya dan dana ini juga dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan gedung RA Permata Hati. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung RA Permata Hati yang dipanitiai oleh masyarakat di sekitar wilayah RA khususnya di lingkungan RA Permata Hati.

Hal lain yang nampaknya cukup menarik terkait terbentuknya panitia pembangunan gedung RA Permata Hati ini ialah inisiasi pembangunan gedung RA Permata Hati justru bermula dari usulan masyarakat di sekitar RA Permata Hati yang merasa iba dengan para siswa yang melaksanakan pembelajaran di rumah-rumah warga, mulai dari teras, ruang tengah hingga garasi mobil warga di mana saat itu Masjid Permata Hati tidak lagi mampu menampung jumlah siswa. Adapun inisiasi warga untuk membangun gedung RA Permata Hati direspon dengan cepat oleh pihak RA khususnya penasihat sekaligus tokoh masyarakat sekitar, melalui perwakilan oleh ketua RW beserta pengurus, ketua RT beserta pengurus, pengurus pengajian muslimat, dan tentunya pihak RA Permata Hati sendiri mulai dari pengurus, guru hingga pendamping untuk menindaklanjuti usulan warga terkait pembangunan gedung RA AlIttihad. Adapun pertemuan tersebut menghasilkan adanya kesepakatan bersama untuk

melaksanakan pembangunan gedung RA Permata Hati, yakni dengan dibentuknya panitia pembangunan gedung RA Permata Hati.

Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikator adanya penggerakan sumber daya atau masyarakat yang ada di wilayah RA untuk mengatasi solusi bagi penyediaan sarana pembelajaran para siswa dalam bentuk pembangunan gedung RA Permata Hati. Selanjutnya, setelah panitia pembangunan gedung RA Permata Hati terbentuk, panitia langsung bergerak dengan mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pembangunan gedung RA tersebut, di antaranya dengan membuat proposal pengajuan dana pembangunan gedung RA Permata Hati yang diedarkan tidak hanya bagi masyarakat di wilayah RA, namun juga di beberapa toko sebagaimana disebutkan pada deskripsi hasil temuan.

Pihak remaja pun turut digerakkan dalam pencarian dana bagi pembangunan gedung RA Permata Hati, yakni dengan penarikan dana dengan menggunakan kotak infak kepada warga di wilayah RA setiap hari Minggu pada pukul 16.00 WIB hingga menjelang Magrib. Dari berbagai upaya panitia tersebut telah mampu menghasilkan dana bagi pembangunan gedung RA Permata Hati, mulai dari pembelian tanah hingga kebutuhan material pembangunannya, baik yang bersumber dari masyarakat di wilayah RA maupun di luar wilayah tersebut, baik dalam bentuk materi/ uang, tenaga, pikiran, maupun barang.

Beberapa hal tersebut semakin memperkuat adanya penggerakan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan gedung RA Permata Hati dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kegiatan khususnya dalam hal pembiayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat di RA Permata Hati. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pembiayaan bisyārah guru serta pendamping. Dalam pelaksanaannya, pihak RA Permata Hati selalu melakukan koordinasi antara pengurus dan guru serta pendamping terkait dengan penerimaan SPP siswa tiap bulannya, yakni yang dibungkus dalam pertemuan pengurus dan guru pada tanggal tiga tiap bulannya untuk berkoordinasi terkait SPP siswa tersebut Adapun pada saat pelaksanaan pembayaran SPP oleh wali

siswa kepada masing-masing wali kelas ketika pertemuan antara pihak RA dengan wali siswa, masing-masing wali kelas melakukan pengadministrasian atau pencatatan pada lembar yang telah disediakan terhadap pembayaran SPP yang dilakukan wali siswa kepada RA di mana secara rinci dapat diketahui kedisiplinan para wali siswa dalam membayar SPP.

Adapun catatan tersebut disampaikan oleh masing-masing wali kelas kepada pengurus saat pertemuan pengurus dan guru serta pendamping pada tanggal empat tiap bulannya khususnya bendahara RA Permata Hati melakukan pencatatan terhadap pemasukan ataupun laporan catatan SPP masing-masing wali kelas untuk dilaporkan kepada wali siswa pada pertemuan antara pihak RA dan wali siswa. Tidak hanya itu, dalam penerimaan bisyārah tiap guru serta pendamping juga diwajibkan membubuhkan tanda tangan pada lembar penerimaan bisyārah yang telah disediakan oleh pengurus di mana dalam lembar tersebut terdapat nominal yang diterimakan masing-masing guru serta pendamping sehingga antara satu dengan yang lain dapat mengetahui nominal yang diterimakan. Pada pelaksanaan program infak siswa yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Kamis dengan minimal nominal yang diinfakan sebesar Rp 500 di mana hal tersebut dikelola oleh wali kelas bahwa masing-masing wali kelas pun memiliki catatan pemasukan dan pengeluaran infak sebagaimana disajikan pada hasil temuan di atas.

Adapun catatan tersebut disampaikan kepada pengurus saat pertemuan antara guru dan pengurus pada tanggal tiga tiap bulannya. Catatan ataupun laporan tersebut juga disampaikan kepada wali siswa pada saat pertemuan wali siswa pada tanggal empat tiap bulannya. Selain dua pelaksanaan administrasi dan koordinasi dua kegiatan di atas, pada pelaksanaan pembangunan gedung RA Permata Hati juga dilakukan adanya administrasi dan koordinasi. Untuk pelaksanaan koordinasi, hal tersebut dilakukan di antaranya melalui rapat panitia pembangunan di mana dalam pertemuan atau rapat tersebut khususnya berkaitan dengan pembiayaan, bendahara pembangunan gedung RA.

Dalam hal administrasi khususnya administrasi pembiayaan, bendahara pembangunan gedung RA Permata Hati memiliki catatan khusus yang berisi

data pembiayaan baik pemasukan dan pengeluarannya termasuk catatan keuangan pada saat pengadaan tanah bagi pembangunan gedung RA Permata Hati. Terkait dengan apa yang disampaikan Cohen dan Uphoff tersebut, dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan di RA Permata Hati dalam hal inisiatif dapat diketahui bahwa dalam beberapa kegiatan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati, inisiatif yang datang cenderung lebih dominan berasal dari masyarakat setempat. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hal, antara lain dalam kenaikan besaran atau nominal SPP dan pembangunan gedung RA Permata Hati. Inisiatif dalam kenaikan nominal SPP sebesar Rp 5.000, yakni dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 merupakan usulan wali siswa yang kemudian mendapat persetujuan dari wali siswa lain hingga akhirnya diperoleh kesepakatan terkait kenaikan nominal SPP sebesar Rp 5.000 di mana hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Adapun dalam pembangunan gedung RA Permata Hati, inisiatif yang ada berasal dari permintaan ataupun usulan masyarakat sekitar yang menghendaki RA AlIttihad memiliki gedung mandiri untuk pembelajaran para siswa sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan tidak menumpang di rumahrumah warga. Adapun apakah partisipasi yang dibangun bersikap paksaan ataukah sukarela, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan partisipasi masyarakat yang dibangun bersifat sukarela.

Hal ini bisa dilihat antara lain pada saat penarikan infak warga yang diedarkan remaja setiap hari Minggu di mana saat itu panitia pembangunan hanya membantu dan memudahkan warga apabila hendak memberikan infak. Dari penjelasan Kevin selaku salah satu remaja yang turut dalam penarikan infak dari masyarakat tersebut menjelaskan bahwa pada penarikan infak tersebut pun terdapat beberapa warga yang tidak memberikan infak karena suatu hal dan para warga pun tidak mendapatkan paksaan untuk wajib berinjak. Hal lain yang dapat menunjukkan kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan RA Permata Hati khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan ialah pada kegiatan haflah ākhir as-sanah. Dari penuturan Darni Kartiono selaku bendahara RA Permata Hati menyebutkan

bahwa pada saat pelaksanaan haflah ākhir as-sanah terdapat beberapa tumpeng bahkan hingga empat buah tumpeng yang disediakan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, pelaksanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati berdasarkan temuan yang ada sangat erat kaitannya dengan swadaya masyarakat, seperti pembiayaan bisyārah guru serta pendamping yang mengandalkan bantuan pengurus dan wali siswa (SPP siswa) hingga dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan tersebut pada tiap bulannya yang mencapai Rp 1.200.000.

Bentuk swadaya lainnya dapat ditemukan pada kegiatan haflah ākhir as-sanah RA Permata Hati di mana dana yang digunakan berasal dari wali siswa khususnya para siswa yang menjadi peserta khatmil qur'an, pengurus RA, dan masyarakat sekitar bahkan hingga penyiapan tempatnya pun melibatkan swadaya masyarakat dengan melaksanakan kerja bakti bagi pelaksanaan kegiatan haflah ākhir as-sanah tersebut termasuk peran serta remaja dalam membantu pembuatan dekorasi panggung. Dari berbagai bentuk swadaya yang diberikan masyarakat, baik materi maupun tenaga pada berbagai kegiatan atau program yang ada di RA Permata Hati menunjukkan adanya kebersamaan masyarakat yang tinggi untuk memecahkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perhatian masyarakat kepada pelaksanaan pendidikan yang ada di RA Permata Hati.

Faktor pendukung peran serta masyarakat RA Permata Hatim meliputi kontribusi wali murid berpartisipasi dalam program sekolah, keikutsertaan masyarakat dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan dengan mengawasi perkembangan pendidikan anaknya, masyarakat membantu sekolah baik dalam mendukung kegiatan sekolah dan membantu menjaga keamanan sekolah kesolidan pengurus komite, dan yang diutamakan di RA Permata Hatiy aitu tentang keagamaan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Imron, dkk juga mengemukakan bahwa untuk mengelola pendidikan, sekolah

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

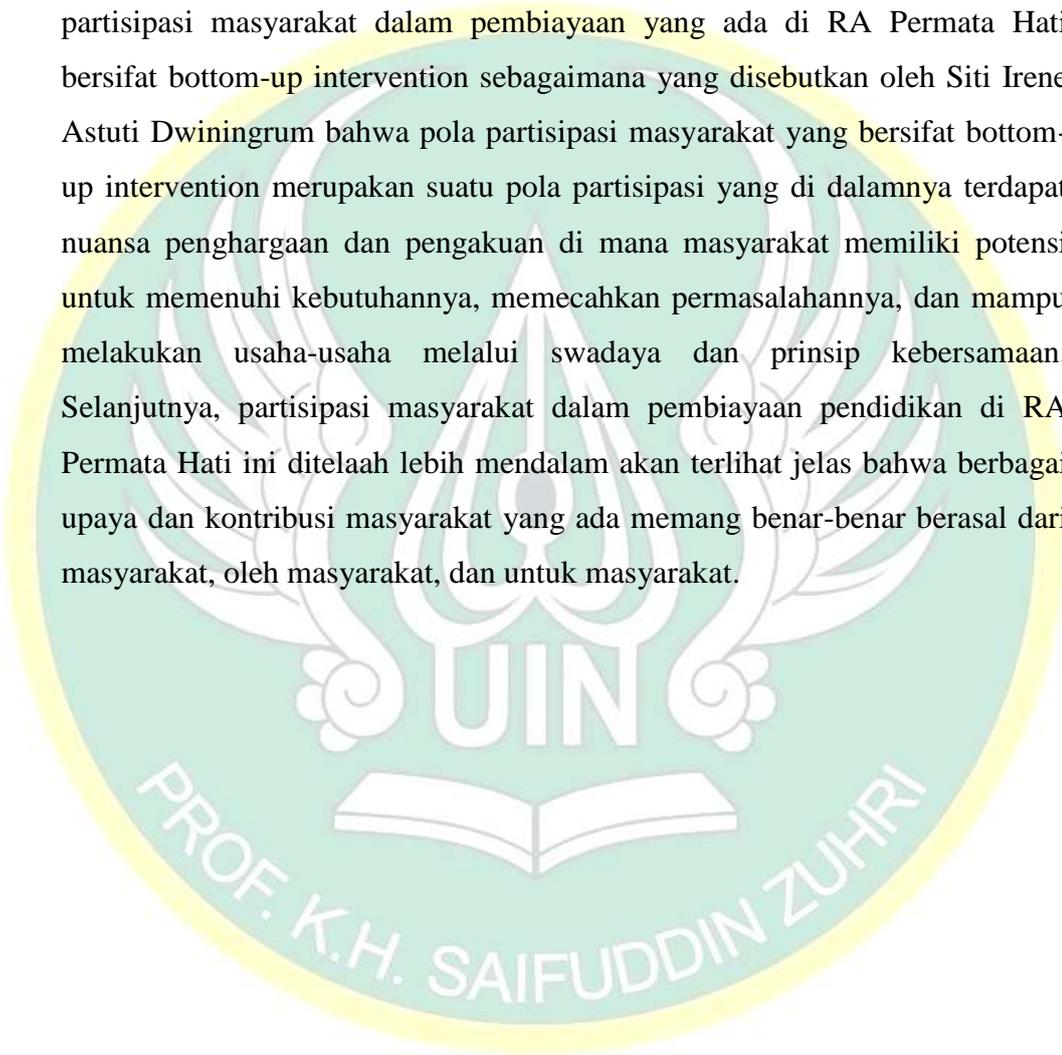
Faktor penghambat di S RA Permata Hati yaitu kesibukan wali murid yang bekerja sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pendapat Kemendikbud yang menyatakan bahwa program MBS ini melatih semua pihak terlibat dalam sekolah bersama-sama dan menekankan bahwa mereka perlu bekerjasama dengan dan di masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis menjadi salah satu faktor penghambat dari peran serta masyarakat dalam RA Permata Hati. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yaitu Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Solusi terhadap hambatan peran serta masyarakat di RA Permata Hati yaitu melalui pendekatan manusia yang tidak resmi yaitu memberikan informasi kepada perwakilan wali murid sehingga bisa disampaikan kepada sesama wali murid. Pada sisi lain dari pihak komite sekolah juga mengungkapkan adanya keterbukaan dari pihak sekolah kepada masyarakat terutama dalam hal dana yang digunakan oleh sekolah. Selain itu, Kepala sekolah juga meyakinkan bahwa RA Permata Hati merupakan sekolah untuk umat Islam serta wali murid yang telah mempunyai *group Whats App* (WA) setiap paguyuban sehingga menjadi lebih efektif ketika berkomunikasi. Hal tersebut didukung oleh pendapat kemendikbud yang mengemukakan bahwa tujuan digalakkannya peran serta masyarakat adalah untuk mendorong masyarakat setempat supaya mereka merasa ‘memiliki’ sekolahnya dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Barnawi dan Arifin yang menyatakan bahwa perlu diperhatikan bahwa sekolah tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan sumber dana dari pemerintah saja. Sekolah berkualitas membutuhkan biaya investasi dan biaya operasional yang sangat

besar. Jika sekolah mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, sekolah tidak akan mampu tumbuh berkembang dengan baik. Bahkan, cenderung kekurangan anggaran sehingga mengakibatkan kualitas sekolah menjadi turun. Jika mutu atau kualitas sekolah menurun, sudah bisa dipastikan bahwa sekolah akan kalah bersaing dan lama kelamaan akan ‘gulung tikar’.

Beberapa hal tersebut di atas dapat menjadi indikator di mana pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang ada di RA Permata Hati bersifat bottom-up intervention sebagaimana yang disebutkan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum bahwa pola partisipasi masyarakat yang bersifat bottom-up intervention merupakan suatu pola partisipasi yang di dalamnya terdapat nuansa penghargaan dan pengakuan di mana masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, dan mampu melakukan usaha-usaha melalui swadaya dan prinsip kebersamaan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati ini ditelaah lebih mendalam akan terlihat jelas bahwa berbagai upaya dan kontribusi masyarakat yang ada memang benar-benar berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati bersifat fungsional religius kultural, yakni partisipasi yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat bagi pengembangan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kebiasaan atau kultur masyarakat. Penggunaan tokoh masyarakat untuk melakukan persuasi agar masyarakat mau berpartisipasi secara aktif merupakan upaya yang dilakukan RA Permata Hati untuk mendorong partisipasi masyarakat, yang berupa 1) Finansial : Biaya operasional KBM, 2) Membangun jaringan : Komunikasi yang ramah dan saling menguntungkan, 3) Usaha : Mencari solusi pemasukan dana demi RA yang unggul, 4) Koperasi : Ikhtiar bersama menuju kemandirian lembaga.

Citizen power merupakan tingkatan partisipasi masyarakat di RA Permata Hati di mana telah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang di masyarakat serta partisipasi yang ada berada pada level engagement, yakni adanya hubungan wali siswa dan pihak RA Permata Hati yang saling menghormati dan mendukung. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati dilaksanakan berikut:

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana anggaran belanja yang berasaskan musyawarah untuk mufakat melalui tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat, baik pada jenis pembiayaan capital cost maupun recurrent cost di mana wujud partisipasinya dilakukan melalui kehadiran dalam pertemuan wali santri, rapat panitia pembangunan gedung RA Permata Hati, dan pertemuan-pertemuan lain yang berada di wilayah RA Permata Hati, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana dengan menggunakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat; kegiatan administrasi dan koordinasi berupa pencatatan dana yang masuk dan keluar; serta penjabaran program pembiayaan pendidikan melalui pertemuan rutin pengurus, guru, dan wali siswa. Selain itu juga dengan

B. Saran

1. Membentuk donatur tetap di luar wali siswa yang berasal dari masyarakat sekitar sebagai upaya penguatan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati.
2. Membuat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek melalui musyawarah bersama wali siswa dan masyarakat sekitar bagi peningkatan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati.
3. Menyusun rencana pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan ustaz, ustazah, dan pendamping RA Permata Hati secara berkala dengan tanpa membebani masyarakat khususnya wali siswa.
4. Memperluas jaringan dalam pencarian dana bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan di RA Permata Hati, baik kepada pihak swasta, lembaga, maupun instansi pemerintah.
5. Partisipasi masyarakat di RA Permata Hati sejatinya tidak hanya terbatas pada pembiayaan pendidikan semata, namun partisipasi masyarakat yang dibangun juga mencakup aspek pembelajaran. Karena keterbatasan waktu dan kesempatan, penelitian ini belum mampu untuk merambah aspek pembelajaran tersebut. Kepada pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema penelitian partisipasi masyarakat dalam pendidikan, penulis merekomendasikan agar pembaca melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam manajemen pembelajaran di RA Permata Hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rofik. "Analisis Pembelajaran Aktif dengan Pendidikan Collaborative Learning pada Mata Kuliah Manajemen Pendidikan di STAIN Kudus", *Jurnal*. Diakses pada 7 April 2021. (<http://journal.stain.kudus.ac.id>)
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Bustanul. 2016. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Ngarayudan Jogrogon Ngawi). Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Ariokunto, Suharsim. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cet 3*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah Alif Luthvi, Latif, dan Anen, "Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Literasi, *IQ (Ilmu Al-Qur'an) Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 1, Nomor 2, 199-219.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewanto, Adi dan Utari, Rahmania. 2006. Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasil wawancara dengan Jauharotunnurul Janah, S.Pd. AUD, (selaku kepala RA Permata Hati), pada Kamis, 14 Oktober 2021, di RA Permata Hati.
- Khoiri, Nur. Model Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Jepara, *Semnas BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2017*, ISBN: 978-602-8916-33-2.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Muhaji, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet IV. Yogyakarta: Rake Sarusin.
- Mulyasa, E.. 2005. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mustaqim, Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal*, diakses pada 15 Oktober 2021, (<https://e-journal.iaingawi.ac.id>.)
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Permatasari, Norhayati Endah. "Peningkatan Hasil IPA Kelas 5 SD Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Berbantu Media Gambar", *JPSD*, Vol. 3 Nomor 2, September 2017 ISSN 2540-9093.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Pendidikan, Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta.
- Purnomo, Sutrimo. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Permata Hati Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas). Tesis. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rohendi, Deni. 2002. Strategi Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (Kajian pada Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung Tahun 2001). Tesis. Bandung: UPI.
- S. Supriono dan Sapari, Achmad. 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Malang: Anggota IKAPTI, cabang Malang.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet ke-22*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini. 2006. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: eKAF.

Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H.A. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Baru*. Jakarta: Grasindo Cipta.

UU. Otonomi. 1999. *Undang-undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Aneka Ilmu.

UU. SISDUKNAS. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Solo: CV. Kharisma Solo.

